



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

LAPORAN
AKHIR



2021

KERANGKA
SATU DATA
KOTA MADIUN

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sasaran.....	4
1.5. Ruang Lingkup	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Data.....	5
2.2. Data Statistik.....	5
2.3. Data Geospasial.....	5
2.4. Satu Data Indonesia	5
2.5. Prinsip Satu Data Indonesia.....	6
2.6. Standar Data.....	6
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN.....	8
3.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	8
3.2 Kondisi Topografi.....	9
3.3 Kependudukan Kota Madiun.....	11

3.4	Ketenagakerjaan Kota Madiun	13
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....		16
4.1.	Sumber Data.....	16
4.2.	Langkah-langkah Penyusunan	16
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		18
5.1	Bidang Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	18
5.2	Bidang Pekerjaan Umum.....	25
5.3	Bidang Kearsipan	97
5.4	Bidang Kebudayaan	111
5.5	Bidang Kelautan.....	133
5.6	Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	136
5.7	Bidang Kesehatan.....	141
5.8	Bidang Komunikasi dan Informatika	166
5.9	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	197
5.10	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	209
5.11	Bidang Lingkungan Hidup	240
5.12	Bidang Pariwisata.....	243
5.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	250
5.14	Bidang Perumahan Rakyat	260
5.15	Bidang Sosial.....	278
5.16	Bidang Statistik	307
5.17	Bidang Tenaga Kerja.....	318



5.18	Bidang Trantibumlinmas	343
5.19	Bidang Perhubungan.....	362
5.20	Bidang Perindustrian	370
5.21	Bidang Perpustakaan	382
5.22	Bidang Persandian.....	389
5.23	Bidang Pertanahan	396
5.24	Bidang Pertanian	408
5.25	Bidang Pendidikan.....	412
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		442
6.1	Kesimpulan.....	442
6.2	Rekomendasi	443

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun	8
Gambar 3. 2 Tinggi Wilayah Topografi di Atas Permukaan Laut (DPL).....	10
Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Tahun 2018-2020.....	11
Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	12
Gambar 3. 5 Kepadatan Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	13
Gambar 3. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun	13
Gambar 3. 7 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2020.....	14
Gambar 3. 8 Jumlah Penduduk yang Bukan Angkatan Kerja Kota Madiun	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan “bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan”. Dapat disimpulkan bahwa peran data adalah sangat penting dalam pembangunan daerah.

Instansi daerah yang bertanggungjawab terhadap data adalah instansi yang menyelenggarakan urusan statistik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun belum ada standar data. Sedangkan dalam rangka mewujudkan data yang akurat,

mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan perlu adanya standar data. Maka pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengadakan kegiatan Penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun dengan harapan elemen data yang tersusun terklasifikasi berdasarkan rumus perhitungan, definisi, satuan, hasil perhitungan, dan sumber data.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemetaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun adalah menyusun standar data Kota Madiun. Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan kerangka Satu Data Madiun antara lain :

1. Tersusunnya standar data Kota Madiun yang terklasifikasi berdasarkan definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
2. Sebagai bahan untuk mengintegrasikan data di Kota Madiun

1.4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kerangka Satu Data Kota Madiun adalah tersusun kerangka satu data yang terklasifikasi berdasarkan definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan dari Organisasi Perangkat Daerah di Kota Madiun.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun adalah data-data yang bersumber dari dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Data

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019, Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

2.2. Data Statistik

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019, Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

2.3. Data Geospasial

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019, Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

2.4. Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

2.5. Prinsip Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Satu Standar Data

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.

b. Satu Metadata Baku

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.

c. Interoperabilitas

Kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagikan antar sistem yang saling berinteraksi

d. Referensi Data

Data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di Portal Satu Data.

2.6. Standar Data

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019, standar data terdiri atas :

a. Konsep

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.

Menurut istilah klasifikasi adalah proses membagi objek atau konsep secara logika kedalam klas-klas hirarki, subklas, dan sub-subklas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya.

c. Ukuran

Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

d. Satuan

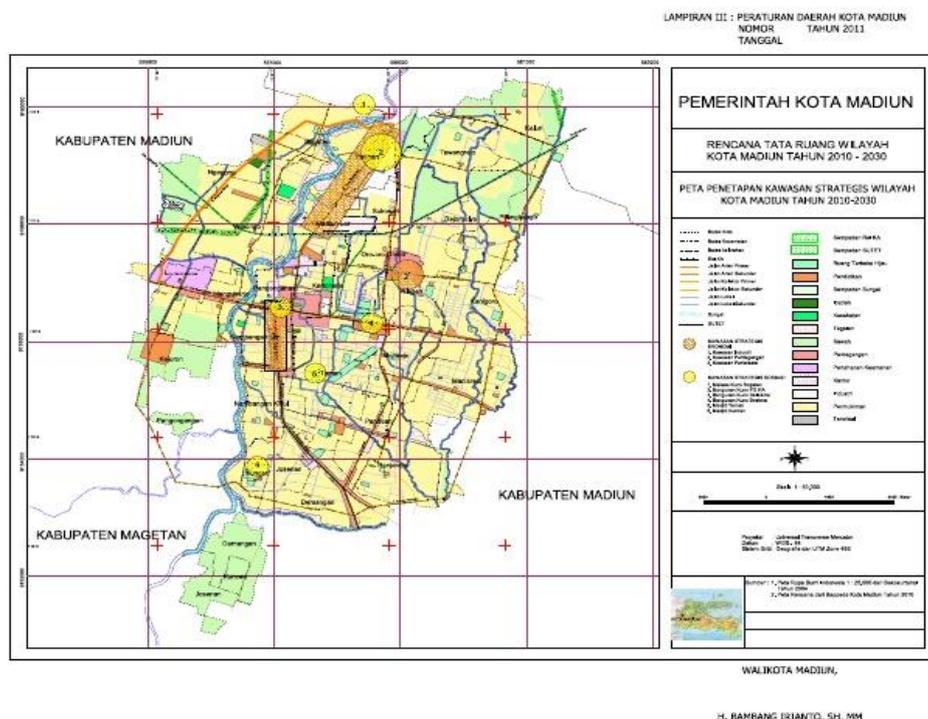
Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN

3.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena topografi tanahnya yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Gambar 3. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun

Sumber : RTRW Kota Madiun 2010-2030

Secara astronomis, Kota Madiun berada di antara 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan atau dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Magetan. Adapun batas-batas wilayah Kota Madiun antara lain:

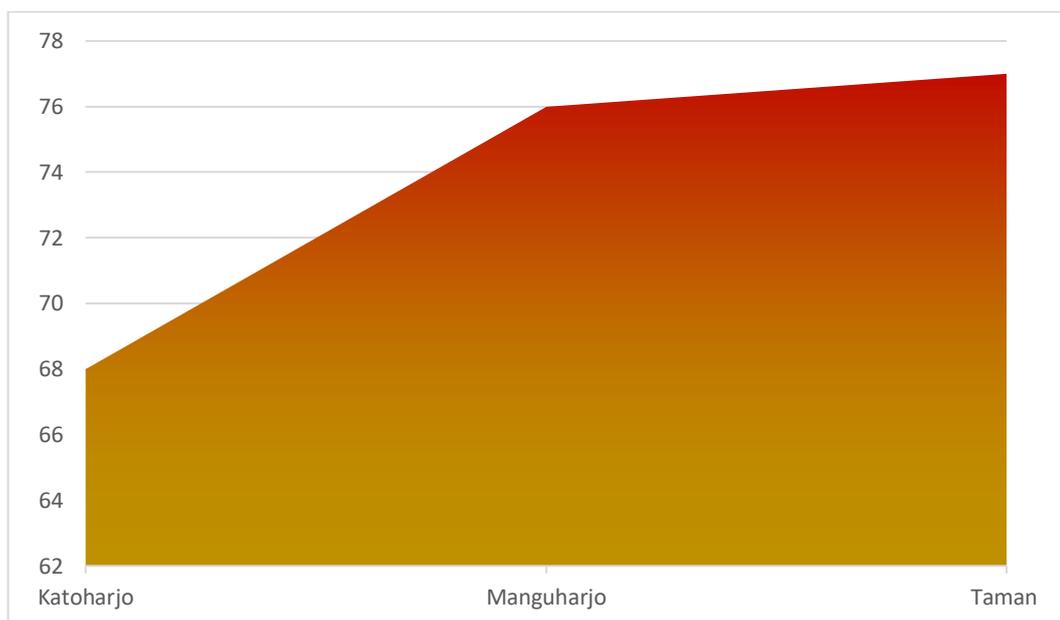
Sebelah Utara : Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun
Sebelah Selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun
Sebelah Timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan
Kecamatan Tekeran, Kabupaten Magetan

Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%) (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2022).

3.2 Kondisi Topografi

Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 77 meter dpl dan di bagian utara selanjutnya menurun hingga 64 meter dpl, sedang di bagian tengah kota, ketinggian rata-rata mencapai 63 meter dpl. Secara rinci,

Kecamatan Manguharjo berada pada ketinggian 76 meter dpl, Kecamatan Taman di ketinggian 77 meter dpl, dan Kecamatan Kartoharjo di ketinggian 68 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 1-2° atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.



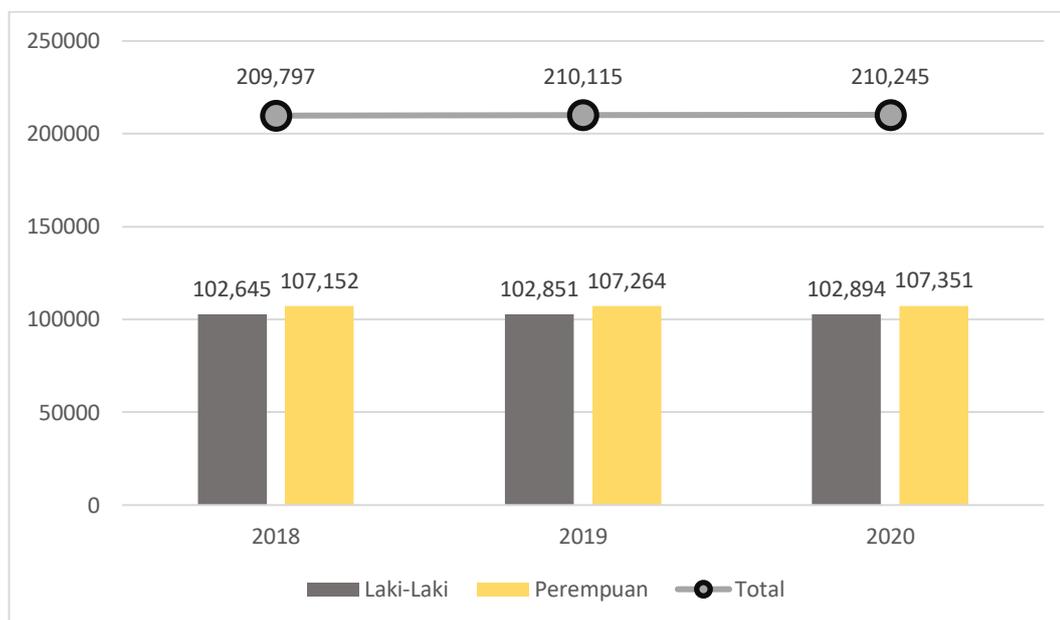
Gambar 3. 2 Tinggi Wilayah Topografi di Atas Permukaan Laut (DPL)

Sumber : BPS Kota Madiun

Kota Madiun dibelah oleh Bengawan Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), sedang di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.

3.3 Kependudukan Kota Madiun

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk di Kota Madiun selama tiga tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

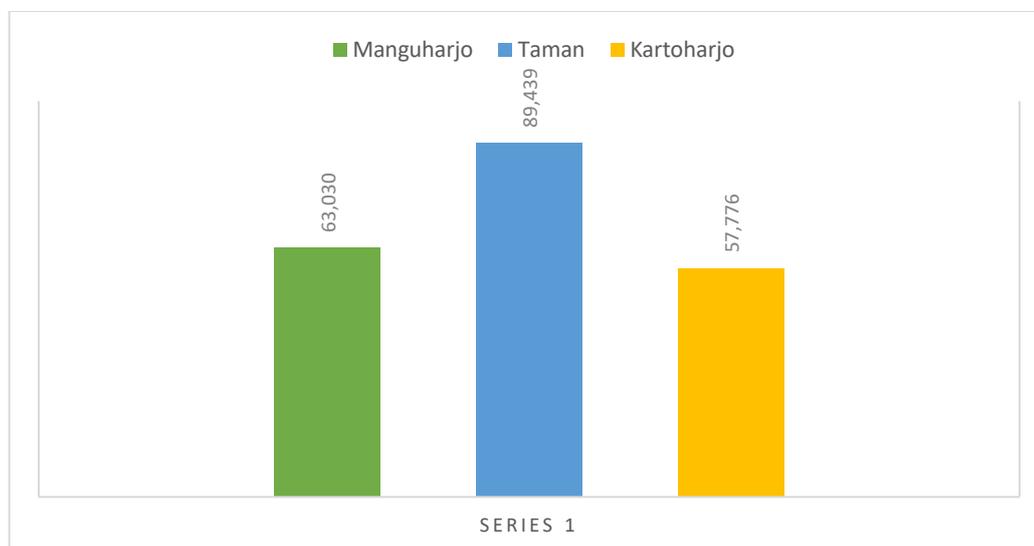


Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Tahun 2018-2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Per Bulan Maret 2020

Jumlah penduduk di Kota Madiun dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan. Jumlah penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018 tercatat 209.797 jiwa, meningkat menjadi 210.115 jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 210.245 jiwa. Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, Kota Madiun didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan.

Adapun jumlah penduduk di Kota Madiun berdasarkan kecamatan pada tahun 2020 sebagai berikut.

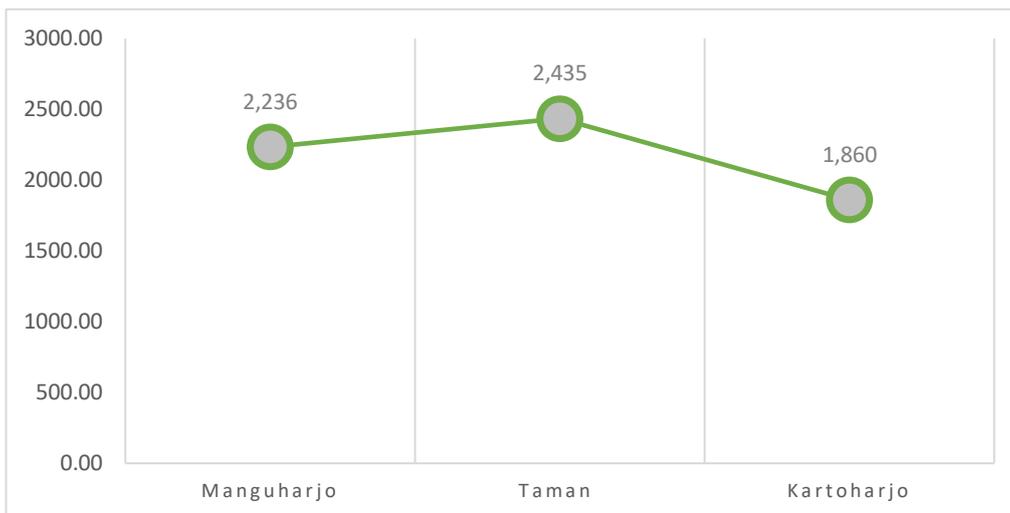


Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Per Bulan
Maret 2020

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Taman sebesar 89.439 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Manguharjo sebesar 63.030 jiwa dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 57.776 jiwa.

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Adapun gambaran kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2020 yang paling tinggi di Kecamatan Taman sebesar 2.435 jiwa/km² artinya setiap 1 kilometer persegi wilayah Kecamatan Taman dihuni oleh 2.435 jiwa. Kepadatan penduduk penduduk terbanyak kedua berada di Kecamatan Manguharjo sebanyak 2.236 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 1.860 jiwa/km².

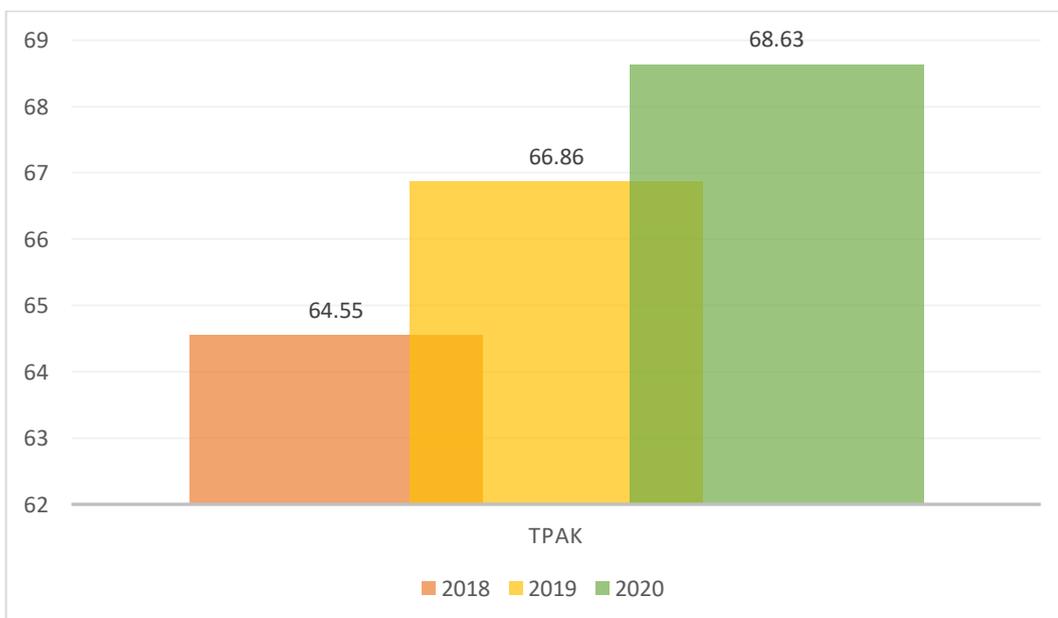


Gambar 3. 5 Kepadatan Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Per Bulan Maret 2020

3.4 Ketenagakerjaan Kota Madiun

Jumlah penduduk yang masuk usia kerja yakni berusia 15 tahun keatas. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun tahun 2020 disajikan pada gambar berikut.

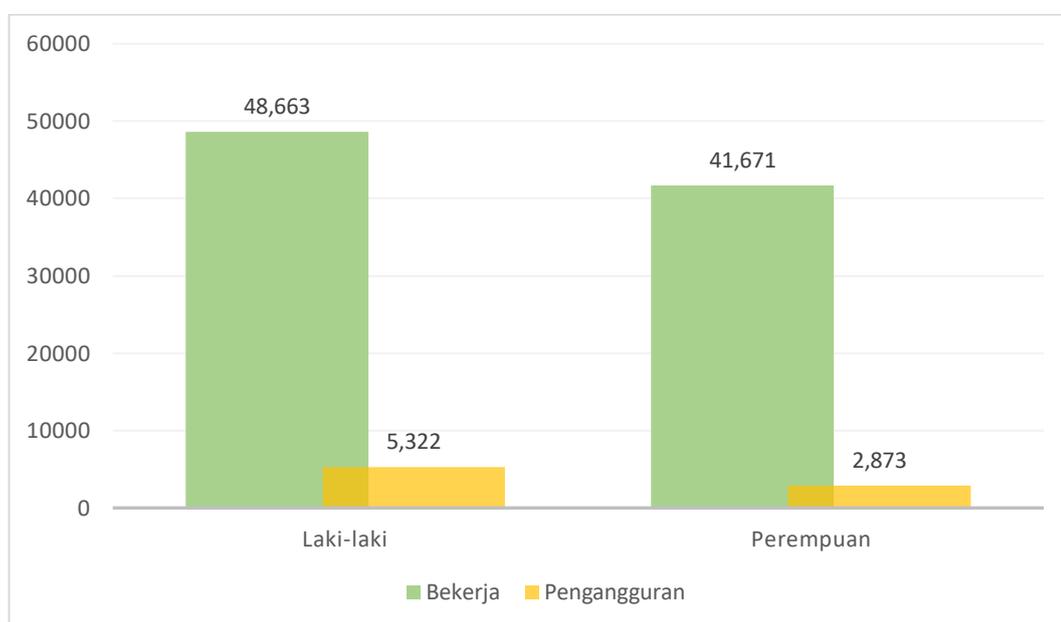


Gambar 3. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Madiun pada tahun 2018 sebanyak 64,55 persen, meningkat setiap tahunnya hingga tercatat 68,63 persen pada tahun 2020.

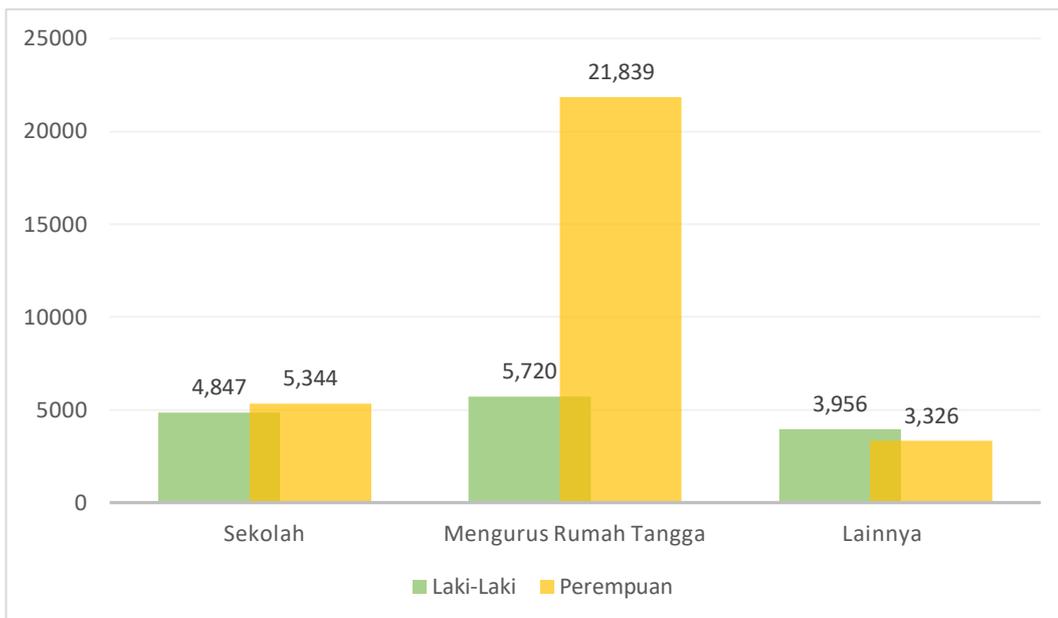
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yakni 15 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sebaran angkatan kerja di Kota Madiun pada tahun 2020 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 7 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Jumlah angkatan kerja di Kota Madiun pada tahun 2020 didominasi penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki yang bekerja sebesar 48.663 jiwa sementara penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan sebesar 41.671 jiwa.



Gambar 3. 8 Jumlah Penduduk yang Bukan Angkatan Kerja Kota Madiun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Jumlah penduduk di Kota Madiun yang bukan angkatan kerja pada tahun 2020 paling banyak adalah perempuan yang berprofesi sebagai rumah tangga sebanyak 21.839 jiwa. Kemudian penduduk yang masih sekolah dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 5.344 jiwa.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Sumber Data

Data dalam kegiatan Kerangka Satu Data Kota Madiun merupakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Dalam hal ini data dikumpulkan dari dokumen dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

4.2. Langkah-langkah Penyusunan

Adapun langkah-langkah penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. Menyusun konsep dari kegiatan penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun

Pada tahap penyusunan konsep meliputi menetapkan Kerangka Satu Data Kota Madiun yang mendukung Satu Data Indonesia. Adapun klasifikasi yang akan disajikan meliputi definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan.

b. Mengumpulkan data

Untuk mendukung kegiatan penyusunan kerangka Satu Data Indonesia diperlukan data yang berasal dari dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

c. Menyusun Kerangka Satu Data Kota Madiun berdasarkan definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya mengklasifikasikan indikator berdasarkan definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan.

d. Menyusun laporan kegiatan Kerangka Satu Data Kota Madiun

Tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah penyusunan laporan kerangka Satu Data Kota Madiun.

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Bidang Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Bidang Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator kinerja dalam hal Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Kepemilikan akta kelahiran, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik		$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota		Persentase	Persen
1	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP			0	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah.	1. WNI/WNA yang memiliki izin tinggal tetap 2. Usia 17 tahun keatas	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			0	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun .	1. WNI/WNA yang memiliki izin tinggal tetap 2. Usia 17 tahun keatas	Jumlah	Orang
3	KTP Elektronik			0	Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana	KTP Elektronik	Jumlah	Unit
4	Penerbitan akta perkawinan		$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	#VALUE!	Penerbitan akta perkawinan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat terkait tentang Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Persentase	Persen
5	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan			0	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen yang diterbitkan oleh pejabat terkait tentang Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menurut hukum dan tata cara agama			
6	Peristiwa perkawinan yang dilaporkan			0	Peristiwa perkawinan yang dilaporkan adalah Peristiwa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Kejadian
7	Penerbitan akta perceraian			#VALUE!	Penerbitan akta perceraian merupakan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Persentase	Persen
8	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		$\frac{\text{Jmlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	0	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan merupakan banyaknya akta yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Unit
9	Peristiwa perceraian yang dilaporkan			0	Peristiwa perceraian yang dilaporkan merupakan peristiwa akta yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Kejadian
10	Penerbitan akta kematian			#VALUE!	Penerbitan akta kematian merupakan akta yang	1. Usia 2. Jenis	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dikeluarkan `bukti yang sah bahwa orang tersebut adalah keturunan dari orang yang sudah meninggal tersebut.	kelamin		
11	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	0	akta kematian merupakan bukti yang sah bahwa orang tersebut adalah keturunan dari orang yang sudah meninggal tersebut.	1. Usia 2. Jenis kelamin	Jumlah	Unit
12	Peristiwa kematian yang dilaporkan			0	kematian adalah “ketiadaan dari hidup” atau “antonim dari hidup.”	1. Usia 2. Jenis kelamin	Jumlah	Kejadian
13	Penyajian Data Kependudukan		$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$ #VALUE!		Yang dimaksud dengan penyajian data kependudukan adalah penyajian data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Jenis Kelamin 2. Tingkat Pendidikan 3. Umur 4. Agama 5. Status Perkawinan 6. Pekerjaan	Persentase	Persen
14	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun adalah banyaknya penyajian data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
II	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	1. Memiliki 2. Tidak Memiliki	Persentase	Persen
1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA			0	Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA merupakan seorang penduduk usia muda (0-17 tahun kurang 1 (satu) hari) yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang yang sudah memiliki KIA	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Anak kandung 4. Anak adopsi 4. Anak tiri	Jumlah	Orang
2	Jumlah anak usia 0-17 tahun			0	Anak usia 0-17 tahun merupakan seorang penduduk usia muda (0-17 tahun) yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang
3	Kartu Identitas Anak (KIA)			0	Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Anak kandung 4. Anak adopsi 4. Anak tiri	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
III	Kepemilikan akta kelahiran		$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	1. Memiliki 2. Tidak memiliki	Persentase	Persen
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir			0	Jumlah anak-anak 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir merupakan seorang penduduk usia muda (0-18) tahun yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang dan yang sudah memiliki akta	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Memiliki 4. Tidak memiliki	Jumlah	Orang
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun			0	Jumlah anak 0-18 tahun merupakan seorang penduduk usia muda (0-18) tahun yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang.	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Anak usia 0-18 tahun	Jumlah	Orang
3	Akta kelahiran		$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	0	Akta Kelahiran adalah suatu dokumen yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
IV	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			#VALUE!	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persentase	Persen
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			0	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekrretariat Daerah , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Praja sesuai dengan kebutuhan daerah	Sekretariat Daerah , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Praja sesuai dengan kebutuhan daerah	Jumlah	Orang
2	Jumlah OPD			0	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka	Sekretariat Daerah , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekrretariat Daerah , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Praja sesuai dengan kebutuhan daerah	Kecamatan, dan Satuan Polisi Praja sesuai dengan kebutuhan daerah		
3	Data Kependudukan			0	Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Jenis Kelamin 2. Tingkat Pendidikan 3. Umur 4. Agama 5. Status Perkawinan 6. Pekerjaan	Jumlah	Unit

5.2 Bidang Pekerjaan Umum

Dalam Bidang Pekerjaan Umum memiliki indikator kinerja dalam hal Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota, Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, Persentase jumlah rumah

tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota, Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota, Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota.	1. klasifikasi banjir 2. klasifikasi sungai	Persentase	Persen
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) adalah kawasan permukiman	1. klasifikasi banjir 2. klasifikasi sungai	Luas	Ha

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)				
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman di WS kewenangan Kab/Kota (ha)	1. klasifikasi banjir 2. klasifikasi sungai	Luas	Ha	
3	kawasan permukiman rawan banjir			0	Yang dimaksud dengan kawasan permukiman rawan banjir adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui	1. Banjir bandang 2. Banjir air 3. Banjir lumpur 4. Banjir rob 5. Banjir	Luas	Ha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman.	cileunang			
4	infrastruktur pengendalian banjir			0	Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi: bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi, dan lain-lain.	1. Banjir bandang 2. Banjir air 3. Banjir lumpur 4. Banjir rob 5. Banjir cileunang	Jumlah	unit	
5	wilayah sungai (WS)			0	Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km ² . Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.	1. Kode Sungai 2. Nama Sungai 3. Jumlah Das 3. Lokasi	Jumlah	km ²	
6	Luas kawasan permukiman rawan			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan	1. klasifikasi banjir	Luas	Ha	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)				permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)	2. klasifikasi sungai			
7	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman di WS kewenangan Kab/Kota	1. klasifikasi banjir 2. klasifikasi sungai	Luas	Ha	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(ha)			
8	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m).			0	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota adalah panjang sungai di kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman di WS kewenangan kabupaten/kota	1. Kode Sungai 2. Nama Sungai 3. Jumlah Das 3. Lokasi	Panjang	m
9	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota adalah luas sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan	1. Berpotensi abrasi 2. Pernah mengalami abrasi	Luas	Ha

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan				
10	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			0	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota adalah panjang pantai di bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan	1. Berpotensi abrasi 2. Pernah mengalami abrasi	Panjang	m ²	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kabupaten/kota			
11	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota.			0	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota.	1. rencana tata pengaturan air 2. tata pengairam	Jumlah	kegiatan
12	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota.			0	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota.adalah Rencana Teknis tata pengaturan air dan hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air	1. teknis tata pengaturan air 2. tata pengairan	Jumlah	kegiatan
13	Data prasarana dan sarana pengaman			0	Data prasarana dan sarana pengaman pantai	1. Wilayah sungai	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota.				dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit). vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya (m)	2. Pola 3. rencana pengelolaan		
II	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1. Berpotensi abrasi 2. Pernah mengalami abrasi	Persentase	Persen
1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman sepanjang	wilayah sungai	Luas	Ha

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)				pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m) adalah luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan bencana abrasi yang yang terlindungi oleh breakwater, seawall, dan lain-lain.di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)				
2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m) adalah luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan bencana abrasi.di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	wilayah sungai	Luas	Ha	
3	wilayah sungai (WS)			0	Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih	1. Kode Sungai 2. Nama Sungai 3. Jumlah Das 3. Lokasi	1. Panjang 2. Lebar	m ²	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km ² . Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.				
4	Pengamanan pantai			0	Pengamanan pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.	Diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai	Jumlah	unit	
5	infrastruktur pengaman pantai			0	Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi: breakwater, seawall, dan lain-lain.	infrastruktur pengaman pantai	Jumlah	unit	
6	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m) adalah luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan bencana	wilayah sungai	Luas	Ha	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					abrasi.di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)				
7	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			0	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota adalah panjang sungai di kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman di WS kewenangan kabupaten/kota	1. Kode Sungai 2. Nama Sungai 3. Jumlah Das 3. Lokasi	Panjang	m	
8	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota adalah luas sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,	1. Berpotensi abrasi 2. Pernah mengalami abrasi	Luas	ha	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan				
9	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			0	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota adalah panjang pantai di bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS	1. Berpotensi abrasi 2. Pernah mengalami abrasi	P	m	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kewenangan kabupaten/kota			
10	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota.			0	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota.	Kabupaten/kota	Ada/tidak	kegiatan
11	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			0	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota.adalah Rencana Teknis tata pengaturan air dan hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air	Kabupaten/kota	Ada/tidak	kegiatan
12	Data prasarana dan			0	Data prasarana dan	Wilayah sungai	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota				sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota merupakan Data prasarana dan sarana yang diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.				
III	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1. Panjang jaringan irigasi Kabupaten/Kota 2. Panjang saluran irigasi Kabupaten/Kota	Persentase	Persen	
1	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)			0	Yang dimaksud dengan luas daerah irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara	1. Panjang jaringan irigasi Kabupaten/Kota 2. Panjang saluran irigasi Kabupaten/Kota	Jumlah	Ha	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					(ha) adalah luas kesatuan lahan kewenangan kab kota yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)				
2	Luas daerah irigasi kewenangan kab kota			0	Yang dimaksud dengan luas daerah irigasi kewenangan kab kota adalah luas kesatuan lahan kewenangan kab kota yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi	1. Panjang jaringan irigasi Kabupaten/Kota 2. Panjang saluran irigasi Kabupaten/Kota	Jumlah	Ha	
3	irigasi			0	Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.	Berdasarkan jenisnya	Jumlah	unit	
4	daerah irigasi			0	Yang dimaksud dengan	Berdasarkan	Jumlah	Ha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi	jenisnya			
5	jaringan irigasi			0	Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	Panjang jaringan irigasi Kabupaten/Kota	Jumlah	m	
6	Cakupan perhitungan			0	Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting.	1. Panjang jaringan irigasi Kabupaten/Kota 2. Panjang saluran irigasi Kabupaten/Kota	Jumlah	Ha	
7	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	#VALUE!	Yang dimaksud dengan persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik adalah mengukur persentase panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari	Berdasarkan Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap yang berkondisi baik				
8	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)			0	Yang dimaksud dengan panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik adalah panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik.	Berdasarkan Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik	Panjang	m	
9	Panjang jaringan irigasi primer (m)			0	Yang dimaksud dengan panjang jaringan irigasi primer adalah panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan	Berdasarkan Jaringan Irigasi Primer	Panjang	m	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.				
10	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	#VALUE!	Yang dimaksud dengan persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik adalah mengukur persentase panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya yang berkondisi baik	Berdasarkan Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik	Persentase	Persen	
11	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)			0	Yang dimaksud dengan panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik adalah panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya yang berkondisi baik	Berdasarkan Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik	Panjang	m	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
12	Panjang jaringan irigasi sekunder (m)			0	Yang dimaksud dengan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.	Berdasarkan Jaringan Irigasi Sekunder	Panjang	m
13	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	#VALUE!	Yang dimaksud dengan presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya yang berkondisi baik.	Berdasarkan Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik	Persentase	Persen
14	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)			0	Yang dimaksud dengan Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik adalah jaringan irigasi yang berfungsi	Berdasarkan Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang	m



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap yang berkondisi baik.				
15	Panjang jaringan irigasi tersier (m)		<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i>	0	Yang dimaksud dengan jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.	Berdasarkan Jaringan Irigasi Tersier	Panjang	m	
IV	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan		$\frac{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				di seluruh kabupaten/kota			
1	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota			0	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum melalui satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Jaringan Perpipaan dalam sebuah kabupaten/kota.				
2	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut			0	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota adalah menghitung total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Berdasarkan proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah	rumah tangga	
3	air minum			0	Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.	Ketersediaan Air Baku	Jumlah	liter	
4	Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM			0	Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	1. SPAM jaringan perpipaan 2. SPAM bukan jaringan perpipaan.	Jumlah	unit	
5	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota			0	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota adalah pemenuhan dokumen suatu rencana jangka panjang 20	1. Ketersediaan Air Baku 2. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum	Jumlah	dokumen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					(duapuluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.	sehari- hari		
6	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota			0	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota adalah Tersusun dan ditetapkan arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan	1. Sampah rumah tangga 2. Sampah sejenis rumah tangga	Jumlah	kebijakan
7	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota			0	Yang dimaksud dengan Jumlah BUMD dan atau	BUMD dan atau UPTD	Jumlah	BUMD dan atau UPTD



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	penyelenggaraan SPAM				UPTD Kab/Kota penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan banyaknya BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.	penyelenggara SPAM		
8	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM			0	Yang dimaksud dengan jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM merupakan banyaknya izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.	Badan Usaha yang mendapat izin penyelenggaraan SPAM	Jumlah	izin
9	Jumlah kerja sama			0	Jumlah kerja sama	Kerjasama	Jumlah	kerjasama



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.				penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.adalah banyaknya kerja sama penyelenggaran satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan engan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	penyelenggara SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain		
V	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			#VALUE!	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase	Persen
1	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di		$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$	0	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD merupakan menghitung	1. klasifikasi cubluk 2. klasifikasi rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT 3. klasifikasi rumah yang memiliki sambungan	Jumlah	rumah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	IPALD				total rumah yang memiliki akses cubluk, PLT, dan IPALD	rumah dan air limbahnya diolah di IPALD		
2	Jumlah rumah di Kabupaten Kota			0	Jumlah rumah di Kabupaten Kota adalah banyaknya bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya di Kabupaten Kota	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	rumah
3	cubluk			0	Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank)	1. Cubluk tunggal 2. Cubluk kempa	Jumlah	unit
4	IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja			0	Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat	1. Prasarana utama 2. Prasarana pendukung	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik			0	Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.	1. Air limbah kakus 2. Air limbah non kakus	Jumlah	unit
6	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD- S			0	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD- S adalah banyaknya rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja	1. Sub sistem pengolahan setempat 2. Sub sistem pengangkutan lumpur tinja 4. Sub sistem pengolahan lumpur tinja	Jumlah	rumah
7	Jumlah rumah			0	Jumlah rumah dengan	1. Subsistem	Jumlah	rumah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T				akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah banyaknya rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	pelayanan 2. Sub sistem pengumpulan 3. Sub sistem pengolahan setempat		
8	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan			0	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T adalah banyaknya rumah dengan akses unit	1. Menggunakan SPALD-S 2. Menggunakan SPALD-T	Jumlah	rumah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	SPALD-S dan SPALD-T				pengolahan setempat dan data rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T				
9	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.			0	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit pengolahan setempat	Rumah tangga yang menerima layanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah	rumah	
10	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.			0	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran	Rumah tangga yang menerima layanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah	rumah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					manusia yang terakumulasi di dalam unit pengolahan setempat				
11	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.			0	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik adalah banyaknya rumah yang sudah menerima pelayanan jasa kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik	1. Skala individual 2. Skala komunal	Jumlah	rumah	
12	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar adalah Kinerja penyediaan pelayanan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan	1. Skala individual 2. Skala komunal	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
13	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik			0	lumpur tinja Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik adalah banyaknya rumah yang memiliki akses pengolahan berupa tempat penampungan tinja	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Jumlah	rumah
14	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha			0	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha adalah banyaknya rumah di wilayah pengembangan kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah	rumah
15	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		$\frac{\text{Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman adalah Kinerja penyediaan pelayanan	1. Skala individual 2. Skala komunal	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik dengan akses aman				
16	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT			0	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT adalah banyaknya rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat	Berdasarkan rumah tangga yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah	rumah	
17	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha			0	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha adalah banyaknya rumah di wilayah pengembangan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah	1. Skala perkantoran 2. Skala permukiman 3. Skala kawasan tertentu	Jumlah	rumah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha				
18	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman adalah Kinerja penyediaan pelayanan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan dengan akses aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. sangat baik 2. baik 3. cukup 4. sedang 5. kurang 	Persentase	Persen	
19	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD			0	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD adalah banyaknya rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya	Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah	rumah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					diolah di bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.				
20	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT			0	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT adalah banyaknya rumah di wilayah pengembangan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terpusat	Jumlah	rumah	
21	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat			#VALUE!	Kinerja Unit Pengolahan Setempat adalah kinerja prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.	1. Air limbah kakus 2. Air limbah non kakus	Persentase	Persen	
22	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat		$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD} - S} \times 100\%$	0	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat adalah banyaknya rumah yang memiliki akses prasarana dan sarana	1. Air limbah kakus 2. Air limbah non kakus	Jumlah	rumah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat				
23	Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S			0	Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S adalah banyaknya rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja	1. Skala individual 2. Skala komunal	Jumlah	rumah	
24	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		$\frac{\text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja adalah Kinerja penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.	1. timbulan lumpur tinja yang akan ditangani 2. kondisi topografi 3. jenis, lebar serta kondisi kualitas jalan 4. jarak dengan IPLT	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
25	Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia			0	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia adalah banyaknya sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja yang tersedia	5. dana yang tersedia 1. timbulan lumpur tinja yang akan ditangani 2. kondisi topografi 3. jenis, lebar serta kondisi kualitas jalan 4. jarak dengan IPLT 5. dana yang tersedia	Jumlah	unit
26	Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota			0	Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota adalah banyaknya sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	1. timbulan lumpur tinja yang akan ditangani 2. kondisi topografi 3. jenis, lebar serta kondisi kualitas jalan 4. jarak dengan IPLT 5. dana yang tersedia	Jumlah	unit
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur		$\frac{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja adalah	1. sangat baik 2. baik 3. cukup	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	tinja				Kinerja penyediaan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4. sedang 5. kurang		
28	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia			0	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah ketersediaan kapasitas prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1. volume tangki septik 2. debit timbulan lumpur tinja per orang	Jumlah	unit
29	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota			0	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota adalah banyaknya kapasitas prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibutuhkan kab/kota	1. volume tangki septik 2. debit timbulan lumpur tinja per orang	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
30	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada kab/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Yang dimaksud dengan Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.	1. sangat baik 2. baik 3. cukup 4. sedang 5. kurang	Persentase	Persen
31	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD			0	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD adalah banyaknya rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik	Berdasarkan rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah	rumah
32	Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota			0	Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota adalah banyaknya rumah yang dilayani dengan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan	Berdasarkan rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah	rumah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan				
33	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		$\frac{\text{jumlah rumah yang tengki septiknya sudah disedot}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	#VALUE!	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja meliputi penyedotan terjadwal dan tidak terjadwal. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. dan Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sangat baik 2. baik 3. cukup 4. sedang 5. kurang 	persentase	Persen	
34	Jumlah rumah yang tengki septiknya sudah disedot			0	Jumlah rumah yang tengki septiknya sudah disedot adalah menghitung banyaknya rumah yang tengki septiknya sudah disedot	<ol style="list-style-type: none"> 1. rumah yang tengki septiknya sudah di sedot 2. rumah yang tengki septiknya belum di sedot 	Jumlah	rumah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
35	Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S			0	Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S adalah banyaknya rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja	Berdasarkan rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	Jumlah	rumah
VI	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1. Jumlah Bangunan Memiliki IMB 2. Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB	Persentase	Persen
1	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya			0	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya adalah banyaknya pemanfaatan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah	izin



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dan sesuai peruntukannya	2. IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung 5. Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi 7. Bangunan			



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		
2	Jumlah IMB yang berlaku			0	Jumlah IMB yang berlaku adalah banyaknya perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku	1. Bangunan Memiliki IMB	Jumlah	izin
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			0	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,	1. Bangunan Memiliki IMB 2. Bangunan Tidak Memiliki IMB	Jumlah	izin



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku				
4	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi.		$\frac{\text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}} \times 100\%$	#VALUE!	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi adalah menghitung rasio wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi.	1. Bangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi 2. Bangunan Gedung yang Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Persentase	Persen	
5	jumlah bangunan			0	Jumlah bangunan gedung	1. Bangunan	Jumlah	bangunan	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku				(kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku	Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi 2. Bangunan Gedung yang Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi		
6	jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)			0	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian	1. Bangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi 2. Bangunan Gedung yang Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah	bangunan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.				
7	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting.			0	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting adalah banyaknya perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku	Bangunan Memiliki IMB	Jumlah	izin	
8	Penetapan			0	Penetapan Peraturan	1. hunian atau	Jumlah	kebijakan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung				Daerah tentang Bangunan/Gedung adalah Penetapan Peraturan Daerah tentang wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku	tempat tinggal 2. kegiatan keagamaan 3. kegiatan usaha 4. kegiatan sosial, budaya, 5. kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku		
9	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung			0	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung adalah Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan	Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah	orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bangunan gedung			
10	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.			0	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku	1. Bangunan gedung yang dilindungi 2. Bangunan gedung yang dilestarikan	Jumlah	bangunan
11	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh			0	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk	1. hunian atau tempat tinggal 2. kegiatan	Jumlah	bangunan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi				kepentingan strategis daerah provinsi adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku	keagamaan 3. kegiatan usaha 4. kegiatan sosial, budaya, 5. kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku		
12	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			0	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi milik Pemerintah Kab/Kota	1. hunian atau tempat tinggal 2. kegiatan keagamaan 3. kegiatan usaha 4. kegiatan sosial, budaya,	Jumlah	bangunan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku	5. kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku			
13	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			0	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat adalah banyaknya wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat	1. Jumlah bangunan gedung yang dirawat/pelihara 2. Jumlah bangunan gedung yang tidak dirawat/pelihara	Jumlah	bangunan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus yang laik fungsi yang berlaku				
VII	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat kemantapan jalan	1. Panjang Jalan 2. Kondisi kemantapan jalan	Persentase	Persen	
1	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap			0	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap adalah panjang prasarana transportasi darat yang meruakan kewenangan provinsi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah	1. Panjang Jalan 2. Kondisi kemantapan jalan	Panjang	km2	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel dalam kondisi baik dan sedang				
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota			0	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota adalah panjang prasarana transportasi darat secara keseluruhan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel di wilayah kabupaten/kota	Panjang Jalan	Panjang	km2	
3	Kemantapan Jalan			0	Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi	1. Jalan dan jembatan kondisi baik	Kondisi	Km	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					baik dan sedang	2. Jalan dan jembatan kondisi sedang 3. Jalan dan jembatan kondisi kurang baik		
4	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota			0	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota adalah panjang prasarana transportasi darat berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel	Panjang Jalan berdasarkan kelas	Panjang	km2
5	Panjang jalan yang			0	Panjang jalan yang	1. Panjang Jalan	Jumlah	km2

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	dibangun				dibangun adalah panjang prasarana transportasi darat yang dibangun yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel	berdasarkan kelas 2. Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi 3. Panjang Jalan Yang Memiliki Fasilitas		
6	Panjang jembatan yang dibangun			0	Panjang jembatan yang dibangun adalah panjang suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya	Panjang Jembatan	Panjang	m
7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)			0	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) adalah panjang prasarana transportasi darat yang	Panjang Jalan	Jumlah	m



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					ditingkatkan struktur/fungsinya yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel				
8	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan			0	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan adalah panjang suatu Konstruksi yang dibangun dan diganti/dilebarkan untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya	1. Kondisi Jembatan 2. Panjang Jembatan	Panjang	m	
9	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi			0	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi adalah panjang prasarana	Panjang Jalan	Panjang	m	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					transportasi darat yang direkonstruksi atau direhabilitasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel				
10	Panjang jembatan yang direhabilitasi			0	Panjang jembatan yang direhabilitasi adalah panjang suatu Konstruksi yang dibangun dan direhabilitasi untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya	1. Kondisi Jembatan 2. Panjang Jembatan	Panjang	m	
11	Panjang jalan yang dipelihara			0	Panjang jalan yang dipelihara adalah panjang prasarana transportasi darat yang	Panjang Jalan	Panjang	m	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dipelihara yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel				
12	Panjang jembatan yang dipelihara			0	Panjang jembatan yang dipelihara adalah panjang suatu Konstruksi yang dibangun dan dipelihara untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya	1. Kondisi baik 2. Kondisi sedang 3. Kondisi kurang baik	Panjang	m	
VII I			$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Jumlah tenaga kerja yang terlatih 2. Jumlah tenaga kerja yang tidak	Persen	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Rasio tenaga operato sertifikat kompetensi					terlatih		
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis			0	Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi	1. Tenaga kerja yang bersertifikat 2. Tenaga kerja yang tidak bersertifikat	Jumlah	orang
2	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota			0	Jumlah kebutuhan tenaga operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota adalah banyaknya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidangnya yang berada di wilayah kabupaten/kota	1. Tenaga operator yang memiliki sertifikat 2. Tenaga operator yang tidak memiliki sertifikat	Jumlah	orang
3	tenaga kerja konstruksi			0	Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi	1. Arsitektur 2. Sipil	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi	3. Mekanikal 4. Tata lingkungan 5. Manajemen pelaksanaan		
4	sertifikat pelatihan			0	Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus	1. Standar nasional 2. Standar internasional 3. Standar khusus	Jumlah	buah
5	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota			0	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota adalah banyaknya pelatihan tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidangnya yang berada di wilayah kabupaten/kota	1. Jenis kelamin 2. Tenaga kerja bersertifikat	Jumlah	kegiatan
6	Jumlah tenaga kerja			0	Jumlah Tenaga	1. Jenis kelamin	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota				operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota adalah banyaknya tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidangnya yang berada di wilayah kabupaten/kota	2. Tenaga kerja bersertifikat		
7	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota adalah banyaknya tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1. Jenis kelamin 2. Tenaga kerja tersertifikasi operator/teknisi/analisis	Jumlah	orang
8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan			0	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang	Berdasarkan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Ada/tidak	Sistem



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir				aktif dengan data termutakhir adalah terselenggaranya Sistem Informasi Pembina layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
9	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			0	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota adalah Tersedianya data dan informasi potensi pasar layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data
10	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah			0	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN				yang bersumber dari APBN adalah Tersedianya data dan informasi potensi pasar layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN				
11	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			0	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya adalah Tersedianya data dan informasi potensi pasar layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	
12	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa			0	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.				sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala merupakan tersedianya data dan informasi paket pekerjaan layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
13	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota			0	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota adalah tersedianya data dan profil Organisasi Perangkat Daerah sub-urusan layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	
14	Tersedianya data dan informasi			0	Tersedianya data dan informasi pelatihan	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja(LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.				tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja(LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya merupakan tersedianya data dan informasi tenaga operator dan teknisi/analisis pada bidang jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintahan lainnya yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja(LPPK) yang diregistrasi oleh menteri				
15	Tersedianya data			0	Tersedianya data dan	1. Tersedia	Ada/tidak	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis				informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis adalah tersedianya data dan informasi mengenai tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi ang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	2. Tidak tersedia		
16	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah			0	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota adalah tersedianya data	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	kab/kota				dan informasi mengenai tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota				
17	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota			0	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota adalah tersedianya data dan informasi pada badan usaha yang mendapatkan pembinaan	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	
18	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			0	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui adalah tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan surat izin untuk melakukan	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk dan dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata				
19	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya adalah tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha pada pelayanan di bidang jasa konstruksi yang meliputi	1. Sesuai 2. Tidak sesuai	Ada/tidak	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi				
20	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah tersedianya data dan informasi tentang kewenangan pengawasan terhadap kecelakaan di bidang jasa konstruksi yang meliputi pekerjaan konstruksi pada suatu proyek	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	
21	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.			0	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah tersedianya data dan informasi hasil pengawasan	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Ada/tidak	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					ketidakesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha terhadap segmentasi pasar di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.				
22	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota			0	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota adalah banyaknya badan usaha yang memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk di wilayah kab/kota	1. Badan usaha memiliki IUJKN 2. Badan usaha tidak memiliki IUJKN	Jumlah	Badan usaha	
23	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota.			0	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) di wilayah kabupaten/kota adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata	Usaha perseroan yang telah memiliki TDUP	Jumlah	usaha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di wilayah kabupaten/kota.				
24	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota.			0	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota adalah banyaknya badan usaha yang memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	1. Jenis badan usaha 2. Memiliki IUJKN	Jumlah	Badan usaha	
25	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota.			0	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota adalah banyaknya badan usaha yang memperoleh bimbingan atau arahan untuk meningkatkan usahanya	Jenis Badan usaha	Jumlah	Badan usaha	
26	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha			0	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1. Disetujui 2. Tidak disetujui	Jumlah	permohonan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	danTDUP yang disetujui.				adalah banyaknya pemenuhan komitmen permohonan surat izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau Pejabat yang ditunjuk dan dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata				
27	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.			0	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah banyaknya pengawasan yang dilakukan pada bidang jasa konstruksi terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	1. Sesuai 2. Tidak sesuai	Jumlah	kegiatan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan/atau kualifikasi usaha			
28	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah banyaknya pengawasan kecelakaan yang terjadi pada proyek di bidang konstruksi	1. Jenis kelamin 2. Jenis proyek	Jumlah	Kejadian
29	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1. Sesuai 2. Tidak sesuai	Jumlah	kegiatan
IX	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						kontruksi 2. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan		
1	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			0	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah banyaknya pengawasan pada proyek tanpa pengawasan terhadap kecelakaan konstruksi	1. Jenis proyek 2. Jumlah proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah	Kejadian
2	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah banyaknya keseluruhan proyek yang mendapatkan pengawasan	Jenis proyek	Jumlah	kegiatan

5.3 Bidang Kearsipan

Dalam Bidang Kearsipan memiliki indikator kinerja dalam hal Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		$\frac{\text{Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} + \text{Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{4} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan	Persentase	Persen
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip adalah persentase arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus yang telah dibuatkan arsip	Daftar Arsip	Persentase	Persen
2	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			0	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip adalah banyaknya arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus yang telah dibuatkan daftar arsip	Daftar Arsip	Jumlah	Unit
3	Jumlah seluruh arsip aktif			0	Jumlah Arsip aktif adalah banyaknya seluruh arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi	Arsip aktif	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan/atau terus menerus.			
4	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip adalah persentase arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun yang telah dibuatkan daftar arsip	1. Asas asal usul 2. Asas aturan asli	Persentase	Persen
5	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip			0	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip adalah banyaknya arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun yang telah dibuatkan daftar arsip	1. Asas asal usul 2. Asas aturan asli	Jumlah	Unit
6	Jumlah seluruh arsip inaktif			0	Jumlah seluruh arsip inaktif adalah banyaknya seluruh arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun	1. Asas asal usul 2. Asas aturan asli	Jumlah	Unit
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik adalah persentase arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang	1. Akuisisi Arsip 2. Pengolahan Arsi 3. Preservasi Arsip 4. Layanan Akses-Pemanfaatan Arsip	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan, yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				
8	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			0	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik adalah banyaknya arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan, yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	1. Akuisisi Arsip 2. Pengolahan Arsi 3. Preservasi Arsip 4. Layanan Akses-Pemanfaatan Arsip	Jumlah	Unit	
9	Jumlah seluruh arsip statis			0	Jumlah seluruh arsip statis adalah banyaknya seluruh arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki	1. Akuisisi Arsip 2. Pengolahan Arsi 3. Preservasi Arsip 4. Layanan Akses-Pemanfaatan Arsip	Jumlah	Unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan				
10	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN adalah persentase jumlah arsip yang dimasukkan kedalam aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN	1. Arsip statis 2. Arsip dinamis	Persentase	Persen	
11	Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			0	Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN adalah persentase jumlah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi	1. Akuisisi Arsip 2. Pengolahan Arsi 3. Preservasi Arsip 4. Layanan Akses-Pemanfaatan Arsip	Jumlah	Unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan/atau terus menerus yang dimasukkan kedalam aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN				
12	Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi			0	Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi adalah banyaknya arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu dan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus dalam pemerintahan provinsi	1. Arsip statis 2. Arsip dinamis	Jumlah	Unit	
13	Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)			0	Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola	1. Arsip statis 2. Arsip dinamis	Ada/tidak	Sistem	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN				
14	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)			0	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI	1. Arsip statis 2. Arsip dinamis	Ada/tidak	Sistem	
II	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		<i>Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/ Kota dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</i>	0	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1. Tingkat keberadaan 2. Tingkat keutuhan	Persentase	Persen	
1	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		$\frac{6}{6}$	$\times 100\%$ 0	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK adalah tingkat kesesuaian kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK			0	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK adalah tingkat kesesuaian langkah perlindungan dan penyelamatan arsip oleh negara bagi arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen
3	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau			0	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK				dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK adalah tingkat kesesuaian tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.				
4	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK			0	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK adalah tingkat kesesuaian pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen	
5	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK			0	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK adalah tingkat kesesuaian arsip yang dihasilkan	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.				
6	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			0	Ketertutupan arsip statis adalah kondisi akses terhadap arsip statis yang karena pertimbangan proses dan/atau kepentingan dinas, dan/atau kepentingan nasional, dan/atau kepentingan hukum yang diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak, yang dikemas secara khusus untuk menjamin kerahasiaan fisik maupun informasinya.	1. Sesuai 2. Tidak Sesuai	Persentase	Persen	
7	Pemusnahan arsip yang			0	Pemusnahan arsip yang	1. Tidak memiliki	Jumlah	Kegiatan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	sesuai NSPK				sesuai NSPK adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan sesuai NSPK	nilai guna 2. Melampaui jangka waktu penyimpanan			
8	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			0	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip adalah langkah pelindungan dan penyelamatan arsip oleh negara bagi arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik negara, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan	Faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya	Jumlah	Kegiatan	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					vandalisme lainnya.				
9	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi			0	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.	1. Kabupaten/kota	Jumlah	Kegiatan	
10	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK			0	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan	1. Asli/sesuai asli 2. Tidak sesuai asli	Jumlah	Kegiatan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					aslinya.			
11	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			0	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK adalah pencarian arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.	1. Kabupaten/kota	Jumlah	Kegiatan
12	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			0	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK adalah	1. Pertimbangan proses 2. Kepentingan dinas 3. Kepentingan Nasional 4. Kepentingan	Jumlah	Kegiatan

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					penerbitan izin untuk penggunaan kondisi akses terhadap arsip statis yang karena pertimbangan proses dan/atau kepentingan dinas, dan/atau kepentingan nasional, dan/atau kepentingan hukum yang diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak, yang dikemas secara khusus untuk menjamin kerahasiaan fisik maupun informasinya.	hukum 5. Khusus 6. Rahasia			

5.4 Bidang Kebudayaan

Dalam Bidang Kebudayaan memiliki indikator kinerja dalam dalam hal terlestarinya cagar budaya. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator pelestarian cagar budaya adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Terlestarikannya Cagar Budaya		$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	1. Pemerintah 2. Swasta	Persentase	Persen
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan			0	Yang dimaksud dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah banyaknya warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan yang dilestarikan	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit
2	Jumlah cagar budaya yang terdata			0	Yang dimaksud dengan jumlah cagar budaya yang terdata adalah banyaknya warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan yang terdata				
3	cagar budaya			0	Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit	
4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	0	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi	Jumlah	unit	
5	Jumlah objek PK yang diinventaris			0	Jumlah objek PK yang diinventaris adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama	Objek PK yang diinventaris	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Pemajuan Kebudayaan yang diinventaris			
6	Jumlah objek PK yang diamankan			0	Jumlah objek PK yang diamankan adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang diamankan	Objek PK yang diamankan	Jumlah	unit
7	Jumlah objek PK yang dipelihara			0	Jumlah objek PK yang dipelihara adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dipelihara	Objek PK yang dipelihara	Jumlah	unit
8	Jumlah objek PK yang diselamatkan			0	Jumlah objek PK yang diselamatkan adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang diselamatkan	Objek PK yang diselamatkan	Jumlah	unit
9	Jumlah objek PK yang dipublikasikan			0	Jumlah objek PK yang dipublikasikan adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dipublikasikan	Objek PK yang dipublikasi	Jumlah	unit
10	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan,		Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	0	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman adalah	Obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pengkajian, penayaan keberagaman				banyaknya unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan ang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		
11	Jumlah objek PK disebarluaskan			0	Jumlah objek PK disebarluaskan adalah banyaknya unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan yang disebarluaskan	Objek PK yang disebarluaskan	Jumlah	unit
12	Jumlah objek PK dikaji			0	Jumlah objek PK dikaji adalah banyaknya unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dikaji	Objek PK yang dikaji	Jumlah	unit
13	Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya			0	Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya adalah banyaknya unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dikayakan keberagamannya)	Objek PK yang dikayakan keberagamannya	Jumlah	unit
14	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan		Jumlah objek dimanfaatkan	0	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) adalah banyaknya unsur kebudayaan	Obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,mening	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	katkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		
15	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) adalah banyaknya orang, lembaga, dan pranata yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola	SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah	orang
16	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi			0	Jumlah sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan kompetensi adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang tertentu yang ditingkatkan kompetensinya	SDM yang ditingkatkan kompetensi	Jumlah	orang
17	Jumlah sdm disertifikasi			0	Jumlah sumber daya manusia (SDM) adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang tertentu	1. Telah disertifikasi 2. Belum disertifikasi	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang telah disertifikasi			
18	Jumlah lembaga distandarisasi			0	Lembaga adalah Himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.	1. Sudah distandarisasi 2. Belum distandarisasi	Jumlah	unit
19	Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola			0	Lembaga adalah Himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.	Lembaga yang ditingkatkan kapasitas tata kelola	Jumlah	unit
20	Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola			0	Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus	Pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Jumlah	unit
21	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	#VALUE!	Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit
22	Jumlah CB ditetapkan			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB ditetapkan adalah	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					banyaknya warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
23	Jumlah CB dihapuskan			0	Yang dimaksud dengan Jumlah CB dihapuskan adalah banyaknya warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan yang dihapuskan	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit	
24	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota		Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	0	Yang dimaksud dengan perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan,	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)				zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) adalah perlindungan terhadap warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
25	Jumlah CB diselamatkan			0	Yang dimaksud dengan Jumlah CB diselamatkan adalah banyaknya warisan budaya yang diselamatkan yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit	
26	Jumlah CB			0	Yang dimaksud dengan jumlah	1. Pemerintah	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	diamankan				CB diamankan adalah banyaknya warisan budaya yang diamankan yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	2. Swasta		
27	Jumlah CB dizonasi			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB dizonasi adalah banyaknya warisan budaya yang dizonasi yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit
28	Jumlah CB dipelihara			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB dipelihara adalah banyaknya	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					warisan budaya yang dipelihara yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
29	Jumlah CB dipugar			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB dipugar adalah banyaknya warisan budaya yang dipugar yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit	
30	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke		Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa	1. Diizinkan 2. Tidak diizinkan	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	luar provinsi dengan dukungan data				benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
31	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) adalah pengembangan warisan budaya yang masuk dalam wilayah provinsi yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan .	1. Benda CB 2. Bangunan CB 3. Struktur CB 4. Situs CB 5. Kawasan CB	Jumlah	unit	
32	Jumlah CB diteliti			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB diteliti adalah banyaknya warisan budaya yang diteliti	1. Benda CB 2. Bangunan CB 3. Struktur CB	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	4. Situs CB 5. Kawasan CB		
33	Jumlah CB direvitalisasi			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB direvitalisasi adalah banyaknya warisan budaya yang direvitalisasi yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	1. Benda CB 2. Bangunan CB 3. Struktur CB 4. Situs CB 5. Kawasan CB	Jumlah	unit
34	Jumlah CB diadaptasi			0	Yang dimaksud dengan jumlah CB diadaptasi adalah banyaknya warisan budaya yang diadaptasi yang bersifat kebendaan berupa	1. Benda CB 2. Bangunan CB 3. Struktur CB 4. Situs CB	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.	5. Kawasan CB		
35	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Jumlah CB dimanfaatkan	0	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) adalah pemanfaatan (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) terhadap warisan budaya di provinsi yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,	1. Pemerintah 2. Swasta	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
36	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum adalah pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap beberapa lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	1. Museum Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal	Jumlah	unit	
37	Jumlah koleksi museum dikelola			0	Jumlah koleksi museum dikelola adalah banyaknya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata yang dikelola	1. Museum Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal	Jumlah	unit	
38	Jumlah koleksi museum diamankan			0	Jumlah koleksi museum diamankan adalah banyaknya	1. Museum Nasional	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata yang diamankan.	2. Museum Regional 3. Museum Lokal		
39	Jumlah koleksi museum dikembangkan			0	Jumlah koleksi museum dikembangkan adalah banyaknya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata yang dikembangkan.	1. Museum Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal	Jumlah	unit
40	Jumlah koleksi museum dimanfaatkan			0	Jumlah koleksi museum dimanfaatkan adalah banyaknya benda cagar budaya,	1. Museum Nasional 2. Museum	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata yang dimanfaatkan.	Regional 3. Museum Lokal		
41	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Jumlah pengunjung museum	0	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	1. Museum Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal	Jumlah	unit
42	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	museum adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam lingkungannya, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk kepentingan generasi yang akan datang	1. Museum Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal	Jumlah	unit
43	Pengelolaan,			0	Pengelolaan, pengamanan,	1. Museum	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum				pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan serta koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.	Nasional 2. Museum Regional 3. Museum Lokal		
44	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah petugas di Instansi Daerah yang membawahi bidang kebudayaan, yang jumlahnya dapat menyesuaikan kebutuhan daerah dengan jumlah minimal 5 (lima) orang.	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Asosiasi Profesi 4. Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah	unit
45	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	Pembentukan tim ahli cagar budaya adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Asosiasi Profesi 4. Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah	unit
46	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar	1. Disertifikasi 2. Belum disertifikasi	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
47	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman		Jumlah sdm CB + jumlah SDM	0	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman adalah pembagian orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam cagar budaya dan permuseuman.	1. Pemerintah Daerah 2. Akademosi 3. Asosiasi Profesi 4. Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah	unit	
48	Jumlah SDM CB			0	Jumlah SDM CB adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat tentang warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau	1. Pemerintah Daerah 2. Akademosi 3. Asosiasi Profesi 4. Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah	orang	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
49	Jumlah SDM			0	Jumlah sumber daya manusia (SDM) adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang tertentu.	1. Jenis kelamin 2. Kompetensi	Jumlah		orang
50	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman		Jumlah sdm CB + jumlah SDM museum	0	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman adalah peningkatan kompetensi orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam cagar budaya dan permuseuman.	1. Jenis kelamin 2. Kompetensi	Jumlah		unit
51	Jumlah SDM CB			0	Jumlah sdm CB adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat tentang warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau	1. Jenis kelamin 2. Kompetensi	Jumlah		orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
52	jumlah SDM museum			0	Jumlah sumber daya manusia (SDM) museum adalah banyaknya orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.	1. Jenis kelamin 2. Kompetensi	Jumlah	orang	
53	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan lembaga yang memeliharanya.	1. sarana yang tersedia	Jumlah	unit	
54	Jumlah sarana dan prasarana CB			0	Yang dimaksud dengan jumlah sarana dan prasarana CB adalah banyaknya sarana dan prasarana warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat	1. Benda CB 2. Bangunan CB 3. Struktur CB 4. Situs CB 5. Kawasan CB	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.				
55	Jumlah sarana dan prasarana museum			0	Jumlah sarana dan prasarana museum adalah banyaknya sarana dan prasarana pada lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat	sarana dan prasarana museum	Jumlah	unit	
56	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat adalah penyelenggaraan kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi yang melibatkan masyarakat.	Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah	unit	

5.5 Bidang Kelautan

Dalam Bidang Kelautan memiliki indikator kinerja dalam hal Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP). Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	0	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah	ton
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Rumah tangga perikanan (RTP) adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan / pembudidayaan / pasca panen ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual (merupakan unit ekonomi)	rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah	tumah tangga
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	#VAL UE!	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					adalah persentase tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.				
3	Jumlah TPI yang operasional			0	Jumlah TPI yang operasional adalah banyaknya tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.	TPI yang operasional	Jumlah	unit	
4	Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota			0	Jumlah TPI yang operasional adalah banyaknya tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan	TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat di wilayah kabupaten kota.				
5	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah banyaknya izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut	Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah	izin	
6	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan /kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	0	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan /kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan	Jumlah	orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						penguatan kelembagaan)		
7	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	0	Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya	1. Benih budidaya air tawar 2. Benih budidaya air payau	Jumlah	ton

5.6 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga memiliki indikator kinerja dalam hal Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, dan Peningkatan prestasi olahraga. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 - 30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (16 - 30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda usia 16-30 tahun	Persentase	Persen
1	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha adalah banyaknya pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha	Jumlah	orang
2	Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota			0	Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda usia 16-30 tahun	Jumlah	orang
3	Ekonomi mandiri			0	Ekonomi mandiri merupakan sistem perekonomian rakyat, yang mengatur mekanisme sumber kehidupan pelaku ekonomi dalam konteks kehidupan masyarakat (gotong royong) berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya.	Ekonomi mandiri	Nilai	angka
4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan merupakan banyaknya pemuda (16-30 tahun) yang mendapat pelatihan mengenai kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai.				
5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan merupakan banyaknya pemuda (16-30 tahun) yang mendapat bantuan kewirausahaan.	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah	orang	
II	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		<i>Jumlah pemuda (16 – 30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota</i> $\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30) tahun di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (16 – 30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1. Regional 2. Nasional 3. Internasional	Persentase	Persen	
1	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota			0	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota adalah banyaknya pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada pengembangan potensi pemuda dan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila di lingkup kabupaten/kota	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah	orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota			0	Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda usia 16-30 tahun	Jumlah	orang
3	organisasi kepemudaan				Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.	1. Regional 2. Nasional 3. Internasional	Jumlah	organisasi
4	Organisasi sosial kemasyarakatan				Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.	1. Regional 2. Nasional 3. Internasional	Jumlah	organisasi
5	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda adalah banyaknya pemuda (16-30 tahun) yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah	orang
6	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi	0	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi	pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		kepemudaan		kepemudaan adalah banyaknya pengelola wadah pengembangan potensi pemuda.yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	manajemen organisasi kepemudaan		
III	Peningkatan Prestasi Olahraga		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	1. medali emas 2. medali perak 3. medali perunggu	Jumlah	Penghargaan
1	Prestasi			0	Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) dalam bidang tertentu	1. medali emas 2. medali perak 3. medali perunggu	Jumlah	Penghargaan
2	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan adalah banyaknya pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga pada kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.	Jumlah	orang
3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah merupakan banyaknya penyelenggaraan hal atau pokok yang akan dibicarakan (dalam rapat, perundingan, dan sebagainya) mengenai OR prestasi tingkat daerah	event OR prestasi	Jumlah	kegiatan

5.7 Bidang Kesehatan

Dalam Bidang Kesehatan memiliki indikator kinerja dalam dalam hal Rasio daya tampung rumah sakit rujukan, Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi, Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Persentase	Persen
1	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan			0	Yang dimaksud dengan jumlah daya tampung rumah sakit rujukan adalah banyaknya tempat tidur.rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	orang
2	Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota			0	Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota adalah banyaknya Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia	1. WNA 2. WNI 3. Jenis Kelamin 4. Usia	Jumlah	orang
3	rumah sakit rujukan			0	Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	Unit
4	daya tampung			0	Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur.	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar adalah banyaknya rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	Unit
II	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	VALUE!	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	Akreditasi RS	Persentase	Persen
1	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi			0	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi adalah banyaknya rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit.	Akreditasi RS	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah RS di Kabupaten/Kota			0	Jumlah rumah sakit adalah banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	Unit
3	Akreditasi RS			0	Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit.	Akreditasi RS	Jumlah	Unit
4	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.			0	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya adalah banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya.	1. RS Umum Daerah 2. RS Swasta	Jumlah	Unit
III	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			#VALUE!	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Puskesmas	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0	Yang dimaksud dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah	orang
2	Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah ibu hamil di kabupaten/kota (penyebut) adalah banyaknya sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Ibu hamil	Jumlah	orang
3	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang)				Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang)	Jumlah	orang
4	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar				Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan.	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Jumlah	orang
IV	Persentase ibu bersalin mendapatkan			#VALUE!	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan	1. Kecamatan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pelayanan persalinan				pelayanan persalinan sesuai standar	2. Puskesmas		
1	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan		$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan adalah banyaknya ibu yang mengalami serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6(enam) jam sesudah melahirkan.	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah	orang
2	Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah banyaknya sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	ibu bersalin	Jumlah	orang
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan untuk pelayanan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6(enam) jam sesudah melahirkan. sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi persalinan sesuai standar	Jumlah	orang
V	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Kecamatan 2. Jenis Kelamin 3. Puskesmas	Persentase	Persen
1	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah banyaknya bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah banyaknya sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar			0	Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam 24 jam pertama kehidupan.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah	orang
VI	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan		
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah banyaknya anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1. Jenis Kelamin 2. balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang
2	Jumlah balita di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah balita di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran balita di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1. Jenis Kelamin 2. usia balita	Jumlah	orang
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit)	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan untuk pelayanan yang ditujukan pada balita sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	Jumlah	orang
VII	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak Usia 7-15 Tahun	Persentase	Persen
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah banyaknya anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Anak Usia 7-15 Tahun	Jumlah	orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota (penyebut) adalah banyaknya anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	Anak Usia 7-15 Tahun	Jumlah	orang
3	pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal	Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah	kegiatan
4	skrining kesehatan			0	Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera.	1. status gizi 2. tanda vital 3. kesehatan gigi dan mulut 4. ketajaman indera	Jumlah	kegiatan
5	tindak lanjut skrining kesehatan			0	Yang dimaksud dengan tindak lanjut skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan apabila diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.	1. status gizi 2. tanda vital 3. kesehatan gigi dan mulut 4. ketajaman indera	Jumlah	kegiatan

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit
7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah	orang
VIII	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			0	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi banyaknya orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	orang
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1. jenis kelamin 2. usia 15-59 tahun	Jumlah	orang
3	Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar			0	Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	kegiatan
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes,	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.				
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang	
IX	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			0	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	orang
2	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1. Kecamatan 2. Kelurahan 3. Jenis Kelamin 4. Usia 60 tahun keatas	Jumlah	orang
3	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar			0	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.	Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah	kegiatan

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang
X	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah banyaknya penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	orang
2	Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalansi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama	1. Kecamatan 2. Kelurahan 3. Jenis Kelamin 4. Usia	Jumlah	orang
3	Pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan.	Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah	kegiatan
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					medis&non medis, barang linen.				
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang	
XI	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	orang
2	Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita DM di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama	1. Jenis Kelamin 2. Usia 3. DM tipe 1 4. DM tipe 2	Jumlah	orang
3	Pelayanan kesehatan			0	Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.	Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah	kegiatan
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					medis&non medis, barang linen.				
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang	
XII	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah banyaknya penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1. Kecamatan 2. Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit) 3. Akses dan Mutu Pelayanan	Jumlah	orang
2	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita ODGJ Berat di kabupaten/kota adalah jumlah proyeksi penderita ODGJ Berat yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama	1. Kecamatan 2. Kelurahan 3. Jenis Kelamin 4. Umur	Jumlah	orang
3	ODGJ Berat			0	Yang dimaksud dengan ODGJ Berat adalah psikotik akut dan schizophrenia.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang
4	pelayanan kesehatan			0	Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.	Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah	kegiatan
5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.				
6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.			0	Sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang	
XIII	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \# \text{VALUE!}$		Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1. Jenis kelamin 2. Tuberkulosis paru BTA positif 3. Tuberkulosis paru BTA negatif	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah banyaknya orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu satu tahun	1. Jenis kelamin 2. Tuberkulosis paru BTA positif 3. Tuberkulosis paru BTA negatif	Jumlah	orang
2	Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	1. Jenis kelamin 2. Tuberkulosis paru BTA positif 3. Tuberkulosis paru BTA negatif	Jumlah	orang
3	Orang terduga TBC			0	Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya	1. Jenis kelamin 2. Tuberkulosis paru BTA positif 3. Tuberkulosis paru BTA negatif	Jumlah	orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang
XIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	1. HIV-1 (HIV tipe 1) 2. HIV-2 (HIV tipe 2)	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			0	Yang dimaksud dengan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah banyaknya ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik, dan warga binaan pemasyarakatan.	1. HIV-1 (HIV tipe 1) 2. HIV-2 (HIV tipe 2)	Jumlah	orang
2	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota			0	Yang dimaksud dengan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV.	1. HIV-1 (HIV tipe 1) 2. HIV-2 (HIV tipe 2)	Jumlah	orang
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			0	Jumlah dukungan logistik yang tersedia meliputi sarana prasarana, obat, barang alkes, food&beverage, bahan habis pakai, barang kuasi, barang medis&non medis, barang linen.	logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			0	Jumlah sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar adalah banyaknya tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan sesuai standar.	1. Jenis kelamin 2. SDM yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah	orang

5.8 Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dan Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	Persentase	Persen
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			0	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
2	Jumlah OPD			0	Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
3	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah unsur pembantu kepala daerah	OPD	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
4	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			0	Perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
5	Jumlah Perangkat Daerah			0	Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	OPD	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo			0	Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
8	Jumlah Perangkat Daerah			0	Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
9	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang			0	Sistem Elektronik komunikasi intra pemerintah yang	Sistem Elektronik Komunikasi	Ada/tidak	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah				disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.			
II	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		$\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	layanan publik	Persentase	Persen
1	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi			0	Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan	layanan publik	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya				
2	Jumlah layanan publik			0	Yang dimaksud dengan jumlah layanan publik adalah banyaknya kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	layanan publik	Jumlah	Unit	
3	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan		<i>Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</i>	#VALUE!	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan	1. klasifikasi event 2. klasifikikasi perangkat daerah	Persentase	Persen	

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$$



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015				memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 adalah mengukur persentase kegiatan (event) unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	3. klasifikasi layanan publik		
4	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi			0	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi	1. klasifikasi event 2. klasifikikasi perangkat daerah 3. klasifikasi layanan	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015				Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 adalah banyaknya kegiatan (event) unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	publik		
5	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah			0	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah adalah banyaknya kegiatan (event) unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang	1. klasifikasi event 2. klasifikikasi perangkat daerah 3. klasifikasi layanan publik	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan				
6	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah mengukur persentase unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	OPD	Persentase	Persen	
7	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar			0	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar			
8	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
9	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang	OPD	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
10	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			0	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	
11	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.				
12	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik adalah mengukur persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Berdasarkan layanan SPBE	Persentase	Persen	
13	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah			0	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara	Berdasarkan layanan SPBE	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	diimplementasikan secara elektronik				elektronik adalah layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik				
14	Jumlah pelayanan			0	Jumlah pelayanan adalah banyaknya kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	1. pelayanan administratif 2. pelayanan barang 3. pelayanan jasa 4. pelayanan regulatif 5. pelayanan elektronik	Jumlah	unit	
15	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang		<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	#VALUE!	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai	Persentase	Persen	

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan elektronik}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$$



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	memanfaatkan sertifikat elektronik				memanfaatkan sertifikat elektronik adalah mengukur persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	kebutuhan		
16	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik			0	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik adalah banyaknya layanan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Berdasarkan layanan SPBE	Jumlah	unin
17	Jumlah pelayanan			0	Jumlah pelayanan adalah banyaknya kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan	1. pelayanan administatif 2. pelayanan	Jumlah	layanan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	barang 3. pelayanan jasa 4. pelayanan regulatif 5. pelayanan elektronik		
18	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menghitung persentase serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik ang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan sistem elektronik	Persentase	Persen
19	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai			0	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai	Berdasarkan sistem	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	ketentuan peraturan perundang-undangan				ketentuan peraturan perundang-undangan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik ang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	elektronik		
20	Jumlah sistem elektronik			0	Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.	Berdasarkan sistem elektronik	Jumlah	Unit
21	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung		$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung	1. layanan publik 2. layanan administrasi	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	layanan pemerintah				layanan pemerintah adalah mengukur persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah				
22	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			0	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah adalah menghitung banyaknya layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	1. layanan publik 2. layanan administrasi	Jumlah	Kegiatan	
23	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi			0	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi adalah menghitung banyaknya layanan publik dan layanan administrasi	1. layanan publik 2. layanan administrasi	Jumlah	Kegiatan	
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah adalah mengukur persentase unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan	OPD	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				
25	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			0	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	
26	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.			
27	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat adalah mengukur persentase unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menyimpan data di pusat	OPD	Persentase	Perangkat Daerah
28	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat			0	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menyimpan data di pusat	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah
29	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.				
30	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya adalah mengukur persentase unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	OPD	Persentase	Persen	
31	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya			0	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya				
32	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	
33	Persentase data yang dapat berbagi pakai		$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase data yang dapat berbagi pakai adalah mengukur persentase bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat yang dapat berbagi pakai	Berdasarkan data yang dapat berbagi pakai	Persentase	Persen	
34	Jumlah data yang dapat berbagi pakai			0	Jumlah data yang dapat berbagi pakai adalah banyaknya bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat	Berdasarkan data yang dapat berbagi pakai	Jumlah	Data	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dijadikan dasar kajian atau pendapat yang dapat berbagi pakai			
35	Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah			0	Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah banyaknya bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat yang dimiliki Pemerintah Daerah	Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Daerah	Jumlah	Data
36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city adalah mengukur persentase unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	OPD	Persentase	Persen
37	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi			0	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	inovasi yang mendukung smart city				inovasi yang mendukung smart city adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city				
38	Jumlah Perangkat Daerah			0	Jumlah Perangkat daerah adalah banyaknya unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	
39	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo adalah mengukur persentase profesi pengelola TIK bagi	Berdasarkan ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo				
40	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			0	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo adalah banyaknya profesi pengelola TIK bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Berdasarkan ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah	Orang	
41	Jumlah ASN pengelola TIK			0	Jumlah ASN pengelola TIK adalah banyaknya profesi pengelola TIK bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah	Berdasarkan ASN pengelola TIK	Jumlah	Orang	
42	Tersedianya peraturan			0	Tersedianya peraturan	Berdasarkan	Ada/tidak	peraturan	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government adalah Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	n peraturan daerah atau peraturan kepala daerah		
III	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat Pendidikan	Persentase	Persen
1	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah			0	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	kabupaten/kota				kabupaten/kota adalah banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota				
2	Jumlah penduduk			0	Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	1.WNA/WNI 2.Jenis Kelamin 3. Usia 4. Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang	
3	Persentase komunitas masyarakat/mitra		<i>Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i>	#VALUE!	Persentase komunitas masyarakat/mitra	Berdasarkan komunitas	Persentase	Persen	

$$\frac{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi}}{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra}} \times 100\%$$

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi				strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi adalah mengukur persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	masyarakat		
4	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah			0	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi adalah menghitung banyaknya komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Berdasarkan komunitas masyarakat	Jumlah	Organisasi
5	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah			0	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah	Berdasarkan komunitas masyarakat	Jumlah	Organisasi



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	daerah provinsi				daerah provinsi adalah menghitung banyaknya komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi			
6	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		$\frac{\text{Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) adalah mengukur persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Berdasarkan komunitas masyarakat	Persentase	Persen
7	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			0	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) adalah menghitung banyaknya konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi	Berdasarkan strategi komunikasi	Jumlah	buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					komunikasi (STRAKOM)			
8	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi			0	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi adalah menghitung banyaknya konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Berdasarkan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah	buah
9	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		$\frac{\text{Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP}}{\text{Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP adalah mengukur persentase Diseminasi dan layanan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-	Berdasarkan strategi komunikasi dan SOP	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP				
10	Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP			0	Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP adalah banyaknya Diseminasi dan layanan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Berdasarkan strategi komunikasi dan SOP	Jumlah	buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dan SOP			
11	Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik			0	Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik adalah banyaknya Diseminasi dan layanan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik	Berdasarkan Diseminasi dan layanan informasi publik	Jumlah	Kegiatan

5.9 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota, Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Berdasarkan OPD	Persentase	Persen
1	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD			0	Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada belanja langsung APBD	Berdasarkan OPD	Jumlah	Rupiah
2	Jumlah seluruh belanja langsung APBD			0	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	Berdasarkan OPD	Jumlah	Rupiah
3	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			0	Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai	Berdasarkan OPD	Jumlah	Lembaga



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal point PUG.				
4	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			0	Jumlah Program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota adalah banyaknya program/kegiatan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota.	Berdasarkan OPD	Jumlah	Kegiatan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
II	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1. Usia 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen
1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi			0	Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah banyaknya manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.yang merupakan korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	1. Usia 2. Lingkup Daerah	Jumlah	Orang
2	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)			0	Jumlah anak adalah banyaknya manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			0	Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak adalah banyaknya media massa yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap anak	1. Jenis Media Massa 2. Usia	Jumlah	Lembaga
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			0	Jumlah Lembaga pelayanan yang dipantau dan dievaluasi harus mencakup seluruh jenis layanan yang dimandatkan di dalam SPM KtPA, baik yang mempunyai hirarki vertikal maupun horizontal	1. Standar Pelayanan Minimal	Jumlah	Lembaga
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			#DIV/0!	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani adalah mengukur persentase manusia yang belum berusia 18 (delapan	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					belas) tahun yang terkena perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap anak yang terlayani				
6	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani			0	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani adalah banyaknya manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang terkena perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap anak yang dilayani	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang	
7	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi			0	Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi adalah banyaknya manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang terkena perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap anak di	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	Orang	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					tingkat provinsi.			
8	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			0	jumlah lembaga pelayanan yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan UPTD PPA aman bagi anak. Pelatihan Manajemen Kasus bagi Pengelola UPTD PPA ini disusun dalam rangka memperkuat fungsi pengelolaan kasus bagi UPTD PPA	1. Jenis Lembaga 2. Lingkup Daerah	Jumlah	Lembaga
9	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			0	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) adalah menghitung banyaknya jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota	1. Jenis Lembaga 2. Lingkup Daerah	Jumlah	Lembaga

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
III	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Berdasarkan Lingkup Daerah	Persentase	Persen
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan			0	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan adalah banyaknya perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap perempuan	Berdasarkan Lingkup Daerah	Jumlah	Orang
2	Jumlah penduduk perempuan			0	Jumlah penduduk perempuan adalah banyaknya warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia berjenis kelamin perempuan.	Berdasarkan Lingkup Daerah	Jumlah	Orang
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			0	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1. Jenis organisasi 2. Lingkup Daerah	Jumlah	Organisasi



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					adalah banyaknya organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan				
4	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			0	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih adalah banyaknya anggota masyarakat desa dan kelurahan berjenis kelamin yang perempuan memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam bidang tertentu di tingkat	Berdasarkan Lingkup Daerah, jenis pelatihan	Jumlah	Orang	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kabupaten/kota yang sudah dilatih			
5	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			0	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan adalah menghitung banyaknya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Berdasarkan Lingkup Daerah, jenis pelatihan	Jumlah	Lembaga
6	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			0	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah menghitung banyaknya jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Berdasarkan lingkup daerah	Jumlah	Lembaga



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			0	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi adalah perhitungan untuk menghitung jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Berdasarkan OPD	Jumlah	Kebijakan
8	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi			0	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi ialah menghitung banyaknya lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Berdasarkan lingkup daerah	Jumlah	Lembaga
9	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	#REF!	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani adalah mengukur persentase seseorang yang terkena perbuatan yang mengakibatkan	Berdasarkan lingkup daerah	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi terhadap perempuan yang terlayani				
10	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan			0	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan adalah banyaknya perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. terhadap perempuan yang mendapatkan layanan	Berdasarkan lingkup daerah	Jumlah	Orang	
11	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			0	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan adalah banyaknya perempuan yang mengalami perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.	Berdasarkan lingkup daerah	Jumlah	Orang	

5.10 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki indikator kinerja dalam Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	1. Sangat Berkualitas 2. Berkualitas 3. Cukup Berkualitas 4. Kurang Berkualitas 5. Tidak Berkualitas	Persentase	Persen
1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset			0	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai	1. RAT 2. Volume Usaha 3. Aset	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan peningkatan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset				
2	Jumlah seluruh koperasi			0	Jumlah seluruh koperasi adalah banyaknya semua badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jasa 2. Konsumen 3. Pemasaran 4. Produsen 5. Simpan pinjam	Jumlah	unit	
3	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase penerbitan izin yang diberikan kepada koperasi sebagai legalitas untuk melakukan	1. Izin Usaha 2. Izin Operasional	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kegiatan usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
4	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan			0	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan adalah banyaknya penerbitan izin yang diberikan kepada koperasi sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	1. Izin Usaha 2. Izin Operasional	Jumlah	unit	
5	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	0	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam adalah banyaknya usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan tetapi belum memiliki izin usaha	1. memiliki Izin 2. Belum memiliki izin	Jumlah	unit	
6	Persentase fasilitasi			#VALUE!	persentase fasilitasi	1. Lingkup Daerah	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase fasilitasi penerbitan izin yang diberikan kepada Koperasi sebagai legalitas untuk membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	2. Jenis Izin		
7	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			0	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan adalah banyaknya izin yang	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Izin	Jumlah	buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					diberikan kepada Koperasi sebagai legalitas untuk membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan				
8	Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			0	Jumlah permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan adalah banyaknya permohonan izin yang diberikan kepada Koperasi sebagai legalitas untuk membuka kantor pelayanan berupa Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas.usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Izin	Jumlah	buah	
9	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	1. Sudah diperiksa dan diawasi 2. belum diperiksa dan diawasi	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
10	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi			0	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat	1. Sudah diperiksa dan diawasi 2. belum diperiksa dan diawasi	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diperiksa dan diawasi				
11	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
12	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase usaha simpan pinjam koperasi oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah banyaknya usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi kinerja	1. Sehat 2. Cukup Sehat 3. Tidak Sehat 4. Sangat Tidak Sehat	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					usaha, keungan, dan manajemen KSP/USP koperasi untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
13	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya			0	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi oleh koperasi yang dinilai kesehatannya adalah banyaknya usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi kinerja usaha, keungan, dan manajemen KSP/USP koperasi	1. Sehat 2. Cukup Sehat 3. Tidak Sehat 4. Sangat Tidak Sehat 5. Jenis Koperasi	Jumlah	unit	
14	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada			0	Jumlah usaha simpan pinjam adalah banyaknya usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan	Berdasarkan Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
15	Persentase koperasi yang mengikuti		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota				untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam daerah kabupaten/kota				
16	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			0	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.				
17	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
18	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase banyaknya pemilik sekaligus pengguna pelayanan badan usaha yang beranggotakan orang	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.				
19	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian			0	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian adalah banyaknya pemilik sekaligus pengguna pelayanan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan telah	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Jumlah	anggota	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					mengikuti pelatihan perkoperasian.			
20	Jumlah anggota koperasi yang ada			0	Jumlah anggota koperasi adalah banyaknya pemilik sekaligus pengguna pelayanan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	Berdasarkan jenis kelamin	Jumlah	anggota
21	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
22	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan			0	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Pelatihan	Jumlah	unit	
23	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Koperasi	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.				
24	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			0	Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1. Lingkup Daerah 2. Jenis Koperasi	Persentase	Persen	
25	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	Fasilitas penerbitan sertifikat NIK untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	dalam daerah kabupaten/kota				daerah kabupaten/kota adalah mengukur banyaknya fasilitas penerbitan sertifikat kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
26	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)			0	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah banyaknya penerbitan sertifikat kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kepemilikan NIK	Jumlah	unit	
27	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.				
28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1. Jenis Koperasi 2. Fasilitas pembiayaan	Persentase	Persen	
29	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan			0	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan	1. Jenis Koperasi 2. Fasilitas pembiayaan	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	fasilitas pembiayaan				fasilitasi pembiayaan adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.				
30	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
31	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan	1. Jenis Koperasi 2. Fasilitas Pemasaran	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.			
32	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran			0	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan	1. Jenis Koperasi 2. Fasilitas Pemasaran	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.				
33	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
34	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
35	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha			0	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha				
36	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
37	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota adalah mengukur persentase banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai	1. Jenis Koperasi 2. Jenis Fasilitas	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
38	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan			0	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan	1. Jenis Koperasi 2. Jenis Fasilitas	Jumlah	unit	
39	Jumlah koperasi yang ada			0	Jumlah koperasi adalah banyaknya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan	1. Jenis Koperasi 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.				
II	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	1. wirausaha baru 2. Lingkup daerah	Persentase	Persen	
1	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha			0	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah banyaknya pelaku usaha mikro yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan	1. wirausaha baru 2. Lingkup daerah	Jumlah	unit	
2	Jumlah usaha mikro keseluruhan			0	Jumlah usaha mikro keseluruhan adalah banyaknya semua usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.	1. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
			$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wira usaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$						



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro			#VALUE!	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro adalah perbandingan pertumbuhan wirausaha baru terhadap jumlah wirausaha yang ada	1. wirausaha andal, 2. wirausaha tangguh 3. wirausaha unggul	Persentase	Persen
4	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru			0	Wirausaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan	1. wirausaha andal, 2. wirausaha tangguh 3. wirausaha unggul	Jumlah	Orang
5	Jumlah wirausaha yang ada			0	Jumlah wirausaha adalah banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan	1. wirausaha andal, 2. wirausaha tangguh 3. wirausaha unggul 4. Lingkup Daerah	Jumlah	Orang

$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$$

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
6	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			#VALUE!	Persentase usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) adalah mengukur persentase banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1. Memenuhi Kriteria 2. Tidak Memenuhi Kriteria	Persentase	Persen
7	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			0	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1. Memenuhi Kriteria 2. Tidak Memenuhi Kriteria	Jumlah	unit
8	Jumlah usaha mikro yang ada			0	Jumlah usaha mikro adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
9	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra adalah mengukur ersentase banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan memiliki kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen
10	Jumlah usaha mikro yang bermitra			0	Jumlah usaha mikro yang bermitra adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan memiliki kerjasama	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro				
11	Jumlah usaha mikro yang ada			0	Jumlah usaha mikro adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
12	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha adalah mengukur persentase banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan diberikan dukungan fasilitasi	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					standarisasi dan sertifikasi produk usaha.				
13	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi			0	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
14	Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk			0	Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran adalah	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					mengukur persentase banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.				
16	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			0	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	
17	Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran			0	Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
18	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Rasio Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen
19	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			0	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit
20	Jumlah usaha mikro yang ada			0	Jumlah usaha mikro adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
21	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	#VALUE!	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan adalah mengukur persentase banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Persentase	Persen
22	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha			0	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit
23	Jumlah usaha mikro yang ada			0	Jumlah usaha mikro adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria	1. Jenis Usaha 2. Lingkup Daerah	Jumlah	unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					usaha mikro.				

5.11 Bidang Lingkungan Hidup

Dalam Bidang Lingkungan Hidup memiliki indikator kinerja dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota, dan Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKD) + (40\% \times ITH)$ <p>dimana : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air Tutupan Hutan IKD = Indeks Kualitas Udara</p>	#REF!	Mengukur Indeks Kualitas Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	1. Kualitas Air 2. Kualitas Udara 3. Tutupan Hutan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Indeks Kualitas Air		$\sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_{rata-rata}^2 + (C_i + L_{ij})_{maksimi}^2}{2}}$ <p>Ci=konsentrasi parameter kualitas air i Lij=konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j</p>	0	Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk mengukur kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Memenuhi Baku Mutu 2. Tercemar Ringan 3. Tercemar Sedang 4. Tercemar Berat	Jumlah	angka
2	Konsentrasi parameter kualitas air (i)			0	Konsentrasi parameter kualitas air (i), Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j)	Konsentrasi parameter kualitas air	Persentase	Persen
3	Konsentrasi parameter kualitas air (i) yang tercantum dalam baku peruntukan air (j)			0	Menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Mutu suatu Peruntukan Air (j)	Konsentrasi parameter kualitas air	Persentase	Persen
4	Indeks Kualitas Udara		$100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$	0	Indeks Kualitas Udara merupakan mekanisme matematis untuk mengukur kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan	1. Memenuhi Baku Mutu 2. Tercemar Ringan 3. Tercemar Sedang 4. Tercemar	Jumlah	angka

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berat			
II	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota		$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. volume sampah 2. Alat angkut Sampah 3. Jumlah TPS	Persentase	Persen	
1	Total volume sampah yang dapat ditangani			0	Total volume sampah yang dapat ditangani adalah jumlah volume sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan dapat ditangani	1. Kandungan bahan sampah	Jumlah	m3	
2	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota			0	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota adalah jumlah volume kumpulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat	1. Kecamatan 2. Kandungan bahan sampah	Jumlah	m3	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota			0	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota adalah Tersedianya data dan informasi penanganan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat	Kecamatan	Ada/Tidak	Ada/Tidak

5.12 Bidang Pariwisata

Dalam Bidang Pariwisata memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota, Tingkat Hunian Akomodasi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	1. Objek Wisata 2. Wisatawan	Persentase	Persen
1	Jumlah Wisatawan			0	Jumlah wisatawan adalah jumlah pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam	1. visitor (pengunjung) 2. Tourist (wisatawan) 3. Excursionist (pelancong)	Jumlah	orang
2	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0	Yang dimaksud sebagai jumlah entitas pengelolaan destinasi adalah banyaknya pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta.	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	organisasi
3	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan	1. Infrastruktur Dasar; 2. Fasilitas umum; 3. Fasilitas pariwisata.	Jumlah	unit



No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata				
4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	0	Yang dimaksud dengan tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota meliputi bidang usaha : Daya Tarik usaha, Kawasan pariwisata, Jasa Transportasi wisata, Jasa perjalanan wisata, Jasa makanan dan minuman, dll	Jenis Usaha	Jumlah	dokumen	
5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Yang dimaksud dengan wisatawan mancanegara per kebangsaan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar tempat tinggalnya kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang	
6	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional dan regional	Klasifikasi berdasarkan event	Jumlah	kegiatan	
7	Jumlah event luar negeri yang diikuti		Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	Event event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota adalah	Klasifikasi berdasarkan	Jumlah	kegiatan	

No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	kabupaten/kota				kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyevaluasian informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala internasional yang diikuti Kabupaten/Kota	event		
8	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Jumlah industri pariwisata daerah yang SDA berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	Jenis industri	Jumlah	unit
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ #VALUE!		Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi adalah Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen
10	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi			0	Tenaga kerja pariwisata tersertifikasi adalah Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	1. Bersertifikat; 2. Tidak bersertifikat.	Jumlah	orang
11	Jumlah tenaga kerja pariwisata			0	Tenaga kerja pariwisata adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang

No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat di sektor pariwisata.				
12	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	#VALUE!	Peserta pembekalan sektor kepariwisataan adalah setiap orang yang mengikuti pembekalan sektor kepariwisataan secara keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha	1. Laki-laki 2. Perempuan	Persentase	Persen	
13	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan			0	Peserta pembekalan sektor kepariwisataan adalah setiap orang yang mengikuti pembekalan sektor kepariwisataan secara keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama	1. Laki-laki 2. Perempuan	Jumlah	orang	

No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha				
14	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan			0	Sasaran pembekalan sektor kepariwisataan adalah ukuran pencapaian pembekalan terhadap keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha	1. Tercapai;	Jumlah	orang	
15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			0	Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat adalah tempat atau daerah yang memperoleh pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta menerima pembinaan kemitraan usaha.	Tempat wisata	Jumlah	lokasi	
II	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	1. Kecamatan 2. Objek Wisata	Persentase	Persen	
1	Jumlah wisatawan			0	Yang dimaksud dengan	1. visitor	Jumlah	orang	

No	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam	(pengunjung) 2. Tourist (wisatawan) 3. Excursionist (pelancong)		
III	Tingkat Hunian Akomodasi		$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	#VALUE!	Tingkat hunian akomodasi adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.	1. Kamar yang terpakai; 2. Kamar yang tersedia.	Persentase	Persen
1	Akomodasi			0	Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata.	Jenis Penginapan	Jumlah	unit
IV	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)	PDRB berdasarkan sektor pariwisata	Persentase	Persen
V	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	PAD berdasarkan sektor pariwisata	Persentase	Persen

5.13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, dan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal}} \times 100\%$ <p><i>(per = awal tahun n)</i></p>	#VALUE!	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Desa Tertinggal	Persentase	Persen
1	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun			0	Jumlah Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah banyaknya desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya berdasarkan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.	Desa Tertinggal	Jumlah	Desa

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			0	Jumlah Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah banyaknya desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	Desa Tertinggal	Jumlah	Desa
3	Indeks Desa Membangun			0	Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa	1. Desa Sangat Tertinggal; 2. Desa Tertinggal; 3. Desa Berkembang; 4. Desa Maju; 5. Desa Mandiri.	Indeks	
4	Desa Mandiri atau Desa Sembada			0	Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.	Nilai IDM > 0,8155	Jumlah	Desa
5	Desa Maju atau Desa Pra-Sembada			0	Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Jumlah	Desa



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					manusia dan menanggulangi kemiskinan.				
6	Desa Berkembang atau Desa Madya			0	Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Jumlah	Desa	
7	Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya			0	Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Jumlah	Desa	
8	Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama			0	Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$IDM \leq 0,4907$	Jumlah	Desa	
9	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.			0	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa. Kerja adalah banyaknya desa yang memiliki fasilitas dalam kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang	1. Bidang Pemerintahan; 2. Bidang Pembangunan; 3. Bidang	Jumlah	Desa	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.	Pembinaan kemasyarakatan; 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat.		
10	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya.			0	Jumlah Desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya adalah banyaknya desa yang melakukan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.	1. Desa yang melakukan kerja sama 2. Desa yang tidak melakukan kerja sama	Jumlah	Desa
11	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan			0	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan yang selanjutnya disingkat LKD adalah banyaknya wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan,	1. Lembaga kemasyarakatan; 2. Lembaga adat	Jumlah	Lembaga



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	diberdayakan.				<p>pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.</p> <p>Jumlah Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah banyaknya lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.</p>			
12	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			0	<p>Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan adalah banyaknya lembaga yang menyediakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang juga merupakan lembaga penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa</p>	<p>1. Ekonomi produktif; 2. Pemberdayaan.</p>	Jumlah	Desa



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dimana lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.				
II	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per - awal tahun n)}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Desa Mandiri	Persentase	Persen	
1	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun			0	Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan berdasarkan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.	1. Indeks ketahanan sosial; 2. Indeks ketahanan ekonomi 3. Indeks ketahanan ekologi desa.	Jumlah	Desa	
2	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			0	Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.	1. Daerah tempat tinggal; 2. perdesaan	Jumlah	Desa	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Indeks Desa Membangun			0	Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa	1. Desa Sangat Tertinggal; 2. Desa Tertinggal; 3. Desa Berkembang; 4. Desa Maju; 5. Desa Mandiri.	Indeks	
4	Desa Mandiri atau Desa Sembada			0	Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.	Nilai IDM > 0,8155	Jumlah	Desa
5	Desa Maju atau Desa Pra-Sembada			0	Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Jumlah	Desa
6	Desa Berkembang atau Desa Madya			0	Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Jumlah	Desa



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					menanggulangi kemiskinan.			
7	Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya			0	Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Jumlah	Desa
8	Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama			0	Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$IDM \leq 0,4907$	Jumlah	Desa
9	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			0	Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa. Kerja adalah desa yang memiliki fasilitas dalam kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.	1. Pemerintahan; 2. Pembangunan; 3. Pembinaan kemasyarakatan; 4. Pemberdayaan masyarakat.	Jumlah	Desa
10	Jumlah desa yang			0	Desa yang melakukan kerja sama antar	1. Desa yang	Jumlah	Desa



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya.				desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya adalah desa yang melakukan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.	melakukan kerja sama 2. Desa yang tidak melakukan kerja sama		
11	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.			0	Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan. Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan atau sebutan lainnya yang	1. Lembaga kemasyarakatan; 2. Lembaga adat	Jumlah	Lembaga



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.				
12	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			0	Jumlah Peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan adalah banyaknya wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang juga merupakan lembaga penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dimana lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	1. Ekonomi produktif; 2. Pemberdayaan.	Jumlah	Desa	

5.14 Bidang Perumahan Rakyat

Dalam Bidang Perumahan Rakyat memiliki indikator kinerja dalam hal Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n			0	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n meliputi : Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana, Pembangunan baru di	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					lokasi baru/relokasi bagi korban bencana, Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana, Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku pada tahun n				
2	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			0	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n meliputi : Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana, Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana, Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana, Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku pada tahun n	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			0	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya adalah banyaknya rumah yang berada pada kawasan tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
4	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			0	Jumlah rumah yang terkena bencana alam adalah banyaknya bangunan yang terkena bencana alam yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
5	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			0	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam adalah menghitung banyaknya rumah tangga, kartu keluarga, dan jiwa korban yang rumahnya	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					terkena bencana alam			
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			0	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi adalah banyaknya bangunan korban bencana yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
7	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			0	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi adalah banyaknya bangunan korban bencana yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
8	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			0	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi adalah banyaknya bangunan korban	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					bencana yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi				
9	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			0	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana adalah menghitung banyaknya unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
10	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi			0	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi adalah menghitung banyaknya rumah tangga, kartu keluarga, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
11	Jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan			0	Jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan adalah mengukur jumlah, luasan, dan lokasi pencadangan lahan	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
II	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan} + \text{rumah tangga penerima subsidi uang sewa} + \text{rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen
1	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan			0	Mengukur banyaknya Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
2	Rumah tangga penerima subsidi uang sewa			0	Mengukur banyaknya Rumah tangga penerima subsidi uang sewa	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Unit
3	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni			0	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni adalah rumah tangga penerima penyediaan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
4	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			0	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					<p>pelayanan adalah menghitung banyaknya keseluruhan rumah tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p>				
5	<p>Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>			0	<p>Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM adalah menghitung banyaknya umah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>	<p>1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan</p>	Jumlah	Buah	
6	<p>Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>			0	<p>Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana</p>	<p>1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan</p>	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					<p>memenuhi SPM adalah menghitung banyaknya rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>				
7	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			0	<p>Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM adalah menghitung banyaknya rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>	<p>1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan</p>	Jumlah	Buah	
8	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			0	<p>Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM adalah menghitung banyaknya rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan</p>	<p>1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan</p>	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
9	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM .			0	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM adalah menghitung banyaknya rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
10	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			0	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah adalah menghitung jumlah keseluruhan uasan (Ha) pengadaan tanah	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
III	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen	
1	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)			0	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha yaitu pemukiman tidak layak	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					huni di bawah 10 ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat				
2	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha			0	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha adalah kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			0	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh adalah banyaknya luasan (ha) penanganan infrastruktur permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.				
4	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			0	Jumlah unit peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah banyaknya unit peningkatan kualitas rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah	
5	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			0	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh adalah banyaknya luasan (ha) penanganan infrastruktur pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Berdasarkan luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
IV	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Persentase	Persen
1	Jumlah unit rumah tidak layak huni			0	Jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) adalah banyaknya rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
2	Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota			0	Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota adalah banyaknya keseluruhan rumah layak huni dan tidak layak huni di Kabupaten/Kota	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah
3	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH			0	Jumlah unit peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah banyaknya unit peningkatan kualitas rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah rumah tidak layak huni			0	Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) adalah banyaknya rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
5	Jumlah rumah yang tidak dihuni			0	Jumlah rumah yang tidak dihuni adalah menghitung banyaknya rumah yang tidak dihuni	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
6	Rasio rumah dan KK		$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	#DIV/0!	Rasio rumah dan KK adalah mengukur rasio rumah dan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan 4. rumah layak huni 5. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah
7	Jumlah KK			0	Jumlah KK adalah banyaknya kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga	1.Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
8	Jumlah total unit rumah			0	Jumlah total unit rumah adalah menghitung total	1. rumah layak huni 2. rumah tidak	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga	layak huni		
9	Jumlah rumah pembangunan baru			0	Jumlah rumah pembangunan baru adalah menghitung banyaknya bangunan pembangunan baru yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
V	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Kabupaten/Kota	Persentase	Persen
1	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU			0	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan 3. Kelurahan	Jumlah	Buah
2	Jumlah unit rumah kab/kota			0	Jumlah unit rumah kab/kota adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					atau hunian dan sarana pembinaan keluarga di wilayah kab/kota				
3	Rumah			0	Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
4	Perumahan			0	Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer)	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
5	Pemukiman			0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau	1. pemukiman layak 2. pemukiman kumuh	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
6	Prasarana			0	kawasan pedesaan Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman	1. sesuai standar 2. tidak sesuai standar	Jumlah	Buah
7	Sarana			0	Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi	1. sesuai standar 2. tidak sesuai standar	Jumlah	Buah
8	Utilitas umum			0	Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian	1. Ada 2. Tidak ada	Jumlah	Buah
9	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			0	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU adalah banyaknya kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) yang terfasilitasi PSU				
10	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			0	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum adalah banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang sudah difasilitasi air minum	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
11	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			0	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan adalah banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang terfasilitasi jalan lingkungan	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
12	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)			0	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)				
13	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			0	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) yang terfasilitasi RTNH	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
14	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			0	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang terfasilitasi akses PJU	1. rumah layak huni 2. rumah tidak layak huni	Jumlah	Buah	
15	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			0	Jumlah pengembang yang tersertifikasi adalah menghitung banyaknya pengembang yang tersertifikasi	Berdasarkan pengembang yang tersertifikasi	Jumlah	Buah	
16	Jumlah pengembang yang			0	Jumlah pengembang yang	Berdasarkan	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	teregistrasi				tersertifikasi adalah menghitung banyaknya pengembang yang teregistrasi	pengembang yang teregistrasi		
17	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			0	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan adalah banyaknya pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Berdasarkan pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah	Buah

5.15 Bidang Sosial

Dalam Bidang Sosial memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) serta Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis 6. Jenis Kelamin	Persentase	Persen
1	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			0	1. Penyandang disabilitas terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak namun tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					<p>2. Anak terlantar adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dimana tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus</p> <p>3. Lanjut usia terlantar adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus</p> <p>4. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum</p> <p>5. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain</p>			



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis			0	Yang dimaksud dengan populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
3	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki			0	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki adalah menghitung banyaknya layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1. Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 2. Lembaga pemenuhan hak anak 3. Lembaga perlindungan perempuan dan anak	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM.			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk.			0	Yang dimaksud dengan jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk adalah menghitung banyaknya Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim Reaksi Cepat	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			0	Yang dimaksud dengan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.			0	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki adalah menghitung banyaknya kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
9	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			0	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar adalah banyaknya rumah singgah yang dimiliki sesuai standar sebagai salah satu sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti sosial asuhan anak 2. Panti sosial petirahan anak 3. Panti sosial bina remaja 4. Pusat rehabilitas narkoba 5. Rumah singgah 	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang menerima paket sandang adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang menerima paket sandang	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang memanfaatkan alat bantu	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
12	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			0	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter adalah banyaknya alat bantu sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1. Panti sosial asuhan anak 2. Panti sosial petirahan anak 3. Panti sosial bina remaja 4. Pusat rehabilitas narkoba 5. Rumah singgah	Jumlah	Orang
13	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia			0	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia adalah menghitung banyaknya paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1. terpenuhi 2. tidak terpenuhi	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
15	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah			0	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah adalah banyaknya orang yang bergiat dalam bidang kesehatan di salah satu sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti sosial asuhan anak 2. Panti sosial petirahan anak 3. Panti sosial bina remaja 4. Pusat rehabilitas narkoba 5. Rumah singgah 	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
16	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			0	<p>Jumlah pekerja sosial professional adalah banyaknya orang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.</p> <p>Jumlah tenaga kesejahteraan sosial adalah orang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Jumlah relawan sosial adalah banyaknya orang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.</p>	<p>1. pekerja sosial pemerintahan 2. pekerja sosial swasta</p>	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis 	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
18	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			0	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat adalah jumlah metode dan teknik dalam penyuluhan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.	Kelompok binaan PKK	Jumlah	kelompok

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
19	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
20	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
21	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
22	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang direunifikasi dengan keluarga	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			0	Yang dimaksud dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang dirujuk adalah sekelompok orang yang mengalami keterbatasan (fisik, intelektual, mental dan atau sensorik) dalam jangka waktu lama dengan kondisi terlantar, orang yang belum berusia 18 tahun dengan kondisi terlantar, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi terlantar, wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi terlantar, dan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum yang dirujuk.	1. Penyandang disabilitas terlantar 2. Anak terlantar 3. Lanjut usia terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
II	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1. Jenis Kelamin 2. Usia	Persentase	Persen
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran			0	Yang dimaksud dengan jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. Jenis Kelamin 2. Usia	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
2	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota			0	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota adalah sekelompok orang yang mengalami bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan dari dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan pengembalian kondisi masyarakat yang terkena bencana	1. Korban Meninggal 2. Korban Hilang 3. Korban Terdampak	Jumlah	Orang
3	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan			0	Yang dimaksud dengan jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan adalah banyaknya orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang mendapatkan makanan.	1. Jenis Kelamin 2. Usia	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			0	Yang dimaksud dengan jumlah korban bencana yang menerima paket sandang adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang menerima paket sandang	1. Jenis Kelamin 2. Usia	Jumlah	Orang
5	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			0	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi dengan utilitas dasar yang dibutuhkan.	1. terpenuhi 2. tidak terpenuhi	Jumlah	Orang
6	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			0	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan adalah menghitung banyaknya paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	1. terpenuhi 2. tidak terpenuhi	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			0	Yang dimaksud dengan jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.	1. bencana alam 2. bencana sosial	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
8	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			0	<p>Jumlah pekerja sosial professional adalah banyaknya orang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.</p> <p>Jumlah tenaga kesejahteraan sosial adalah orang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Jumlah relawan sosial adalah banyaknya orang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.</p>	<p>1. jenis kelamin 2. pekerja sosial baik pemerintah atau swasta</p>	Jumlah	Orang

5.16 Bidang Statistik

Dalam Bidang Statistik memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD yang menggunakan data statistik	Persentase	Persen
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			0	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah banyaknya organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang	OPD yang menggunakan data statistik	Jumlah	Perangkat Daerah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah yang menggunakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
2	Jumlah OPD			0	Jumlah OPD adalah banyaknya organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan	OPD	Jumlah	Perangkat Daerah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah				
4	Tersedianya buku profil daerah			0	Tersedianya buku profil daerah adalah mengukur ketersediaan buku profil daerah	1. Tersedia 2. Tidak tersedia	Jumlah	Unit	
5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			0	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karakteristik suatu obyek pada saat tertentu pada statistik pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	Survei	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.				
6	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan				Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat dalam statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	kegiatan	
7	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS				Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	Survei	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					sesuatu populasi untuk memperoleh karakteristik suatu obyek pada saat tertentu pada statistik pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi BPS.				
8	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	0	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat dalam statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	kegiatan	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang mendapat rekomendasi dr BPS				
9	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral			#DIV/0!	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral adalah mengukur kelengkapan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan	Kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persen	
10	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral			0	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral adalah jumlah sekumpulan atribut informasi yang memberikan	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	Metadata kegiatan	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan				
11	Jumlah kegiatan statistik sektoral			0	Jumlah kegiatan statistik sektoral adalah banyaknya kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	kegiatan	
12	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral		$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	0	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral adalah mengukur	kelengkapan metadata variabel sektoral	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kelengkapan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan				



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
13	Jumlah metadata indikator statistik sektoral				Jumlah metadata indikator statistik sektoral adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	Metadata indikator
14	Jumlah indikator statistik sektoral				Jumlah indikator statistik sektoral adalah banyaknya indikator statistik yang pemanfaatannya ditujukan	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	indikator



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.				
II	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Persentase	Persen	
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			0	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah banyaknya organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri	Berdasarkan OPD Kabupaten/Kota	Jumlah	Perangkat Daerah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah yang menggunakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
2	Jumlah OPD			0	Jumlah OPD adalah banyaknya organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,	Kabupaten/Kota	Jumlah	Perangkat Daerah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah				

5.17 Bidang Tenaga Kerja

Dalam Bidang Tenaga Kerja memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, Tingkat produktivitas tenaga kerja, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Kegiatan	Persentase	Persen
1	Jumlah kegiatan keseluruhan yang			0	Jumlah kegiatan keseluruhan yang	Kegiatan	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	dilaksanakan yang mengacu ke RTKD				dilaksanakan yang mengacu ke RTKD adalah pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada hasil perencanaan tenaga kerja daerah yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan				
2	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.			0	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota adalah mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dokumen perencanaan tenaga kerja	Jumlah	Dokumen	
3	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi indikator}} \times 100\%$		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja adalah mengukur tingkat akurasi proyeksi indikator dalam hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan	1. tenaga kerja terdidik 2. tenaga kerja terlatih 3. tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan				
4	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota			0	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota adalah banyaknya perusahaan di kabupaten/kota yang menyusun hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan	1. tenaga kerja terdidik 2. tenaga kerja terlatih 3. tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih	Jumlah	Perusahaan	
5	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan			0	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan adalah banyaknya perusahaanyang melaporkan penyusunan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta	Berdasarkan RTKD	Jumlah	Perusahaan	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					neraca dan program ketenagakerjaan			
II	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kabupaten/Kota	Persentase	Persen
1	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi			0	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja yang memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	1. Penduduk usia 15 tahun keatas 2. Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
2	Jumlah tenaga kerja keseluruhan			0	Jumlah tenaga kerja keseluruhan adalah seluruh orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	1. Penduduk usia 15 tahun keatas 2. Jenis Kelamin	Jumlah	jiwa
3	sertifikat kompetensi kerja			0	Yang dimaksud dengan	Berdasarkan	Jumlah	Dokume



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	kompetensi kerja tertentu		n
4	KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)			0	Yang dimaksud dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.	1. bidang pendidikan 2. bidang pelatihan kerja	Ada/tidak	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun } n}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n}$	$\times 100\%$ #REF!	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster merupakan pengukuran terhadap suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai dengan kualifikasi klaster	Berdasarkan penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persentase	Persen
6	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n			0	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n merupakan banyaknya penerapan proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai dengan kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	Berdasarkan penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi	Jumlah	Kegiatan
7	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n}$	$\times 100\%$ #REF!	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi adalah mengukur banyaknya instruktur yang memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi	Berdasarkan instruktur bersertifikat kompetensi	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)				
8	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n			0	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n adalah banyaknya instruktur yang memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) pada tahun n	Berdasarkan instruktur peserta pelatihan	Jumlah	Orang	
9	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	#REF!	Mengukur Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Berdasarkan instruktur bersertifikat kompetensi	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
10	Persentase LPK yang terakreditasi		$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditsi pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$	#REF!	Persentase LPK yang terakreditasi adalah pengukuran terhadap instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan telah melalui proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	Berdasarkan LPK yang terakreditasi	Persentase	Persen
11	Persentase LPK yang memiliki perizinan		$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$	#REF!	Persentase LPK yang memiliki perizinan adalah pengukuran terhadap instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja serta memiliki perizinan	Berdasarkan LPK yang memiliki perizinan	Persentase	Persen
12	Jumlah penganggur yang dilatih			0	Jumlah penganggur yang dilatih adalah menghitung	1. Pengangguran	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					banyaknya penganggur yang dilatih	Terbuka 2. Setengah Menganggur 3. Pengangguran Terselubung		
13	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$	#REF!	Mengukur persentase lulusan bersertifikat pelatihan	1. jenis kelamin 2. lulusan bersertifikat pelatihan	Persentase	Persen
14	Persentase penyerapan lulusan			#REF!	Mengukur persentase penyerapan lulusan	1. laki-laki 2. perempuan	Persentase	Persen
15	Lulusan bersertifikat kompetensi		$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	#DIV/0!	Lulusan bersertifikat kompetensi adalah lulusan yang memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	1. jenis kelamin 2. lulusan bersertifikat kompetensi kerja	Persentase	Persen
16	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n			0	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n adalah lulusan pelatihan yang	1. jenis kelamin 2. lulusan bersertifikat	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) pada tahun n	kompetensi kerja			
17	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n			0	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n adalah menghitung banyaknya lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	1. jenis kelamin 2. lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah	Orang	
18	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.		$\frac{\text{Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dilatih}}{\text{jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terdaftar}} \times 100\%$	#REF!	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.adalah banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah	1. Jenis kelamin 2. Usia	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang diberikan pelatihan				
19	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah banyaknya pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan	Berdasarkan pelatihan CPMI/CTKI	Jumlah	Kegiatan	
III	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	Kabupaten/Kota	Persentase	Persen	
1	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)			0	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk suatu negara	Kabupaten/Kota	Jumlah	Rupiah	
2	Jumlah tenaga kerja			0	Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya orang	1. Penduduk usia 15 tahun	Jumlah	Orang	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat	keatas 2. Jenis Kelamin		
3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n}$	#REF! $\times 100\%$	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen
4	Data tingkat produktivitas total		Pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)	#REF!	Data tingkat produktivitas total merupakan metode pengukuran produktivitas dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pertumbuhan modal dengan pertumbuhan tenaga kerja	Berdasarkan data tingkat produktivitas total	Persentase	Persen
IV	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	#REF!	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	#REF!	Persentase perusahaan yang telah memiliki	1. perusahaan pemerintah	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	Perusahaan (PP)				Peraturan Perusahaan (PP) adalah pengukuran terhadap perusahaan yang telah memiliki peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.	2. pemerintahan swasta			
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	#REF!	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan pengukuran atau perhitungan terhadap perusahaan yang telah memiliki hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kewajiban kedua belah pihak.			
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan.			0	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan adalah jumlah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam 1 (satu) perusahaan.	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	#REF!	Mengukur persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	#REF!	Mengukur persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	#REF!	Mengukur persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Persentase	Persen
7	Jumlah mogok kerja			0	Jumlah mogok kerja adalah banyaknya tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan	1. tenaga kerja laki-laki 2. tenaga kerja perempuan	Jumlah	Kegiatan
8	Jumlah penutupan perusahaan			0	Jumlah penutupan perusahaan adalah tindakan pengusaha	1. perusahaan pemerintah 2.	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan	pemerintahan swasta		
9	Jumlah perselisihan kepentingan			0	Jumlah perselisihan kepentingan adalah banyaknya pertentangan antar organisasi dalam suatu kepentingan	berdasarkan perselisihan kepentingan	Jumlah	Kegiatan
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			0	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan adalah banyaknya pertentangan antar organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan	1. perusahaan pemerintah 2. pemerintahan swasta	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					keluarganya dalam 1 (satu) perusahaan.			
11	Jumlah perselisihan PHK			0	Jumlah perselisihan PHK adalah banyaknya pertentangan pekerja/buruh yang mengalami pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha	Berdasarkan perselisihan PHK	Jumlah	Kegiatan
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			0	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK adalah banyaknya pekerja/buruh yang mengalami pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha	1. Jenis kelamin 2. Usia	Jumlah	Orang
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Berdasarkan perselisihan yang	Jumlah	Kegiatan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					adalah banyaknya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang diselesaikan melalui forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah	diselesaikan melalui perundingan bipartite		
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan.			0	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan.adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,	1. organisasi pengusaha 2. serikat pekerja 3. pemerintah	Jumlah	Lembag a



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dan pemerintah di kabupaten/kota yang diberdayakan.				
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.		$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	0	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial adalah pengukuran terhadap banyaknya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diselesaikan melalui	1. Bipartit 2. Tripartit 3. Mediasi	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial				
V	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	1. laki-laki 2. perempuan 3. usia 15 tahun keatas	Persentase	Persen	
1	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan			0	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan adalah banyaknya perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja yang ditempatkan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	1. laki-laki 2. perempuan	Jumlah	jiwa	
2	Jumlah pencaker yang terdaftar			0	Jumlah pencaker yang terdaftar adalah banyaknya perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan	1. laki-laki 2. perempuan	Jumlah	jiwa	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					tenaga kerja yang terdaftar dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.				
3	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			0	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota adalah mengukur banyaknya lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Buah	
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota.			0	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota adalah banyaknya perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja yang terdaftar di kab/kota dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	1. laki-laki 2. perempuan	Jumlah	Orang	
5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah			0	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah,	1. satuan pendidikan menengah 2. satuan pendidikan tinggi	Jumlah	Unit	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan tenaga kerja kepada alumninya.	3. lembaga pelatihan kerja		
6	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			0	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota adalah tenaga kerja yang memiliki bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) terdaftar dalam satu kabupaten/kota.	1. Penduduk usia 15 tahun keatas 2. Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
7	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja adalah banyaknya jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan	Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					peayanan antarkerja			
8	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota adalah lembaga berbadan hukum antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Berdasarkan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah	Lembag a
9	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			0	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota adalah banyaknya perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	1. perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 2. perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)	Jumlah	Kegiata n
10	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online			0	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja	1. tenaga kerja terdidik 2. tenaga kerja	Jumlah	Kegiata n

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	(SISNAKER).				(IPK) Online (SISNAKER).adalah banyaknya proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).	terlatih 3. tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih		
11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.		$\frac{\text{Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.}}{\text{Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)}} \times 100\%$	0	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.adalah banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mendapatkan sosialisasi.	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. CPMI 4. CTKI	Jumlah	Orang
			$\frac{\text{Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\text{Jumlah PMI yang pulang}} \times 100\%$					
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang			#REF!	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	1. Jenis kelamin 2. Usia	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	mendapatkan fasilitasi kepulangan.				yang mendapatkan fasilitasi kepulangan adalah banyaknya warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	3. PMI 4. TKI		
13	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\text{Jumlah PMI/TKI}} \times 100\%$	#REF!	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan adalah banyaknya warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	1. Jenis kelamin 2. Usia 3. PMI 4. TKI	Jumlah	Orang
14	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		$\frac{\text{Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	#REF!	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya merupakan data	Berdasarkan data pemberdayaan PMI/TKI	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pemberdayaan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja				
15	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		$\frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	#REF!	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk adalah banyaknya sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.	Berdasarkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah	Kegiatan	

5.18 Bidang Trantibumlinmas

Dalam Bidang Trantibumlinmas memiliki indikator kinerja dalam hal Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan

bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	Persen
1	Jumlah pengaduan yang ditangani			0	Jumlah pengaduan yang ditangani adalah menghitung banyaknya pengaduan yang ditangani	Pengaduan yang ditangani	Jumlah	Pengaduan
2	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			0	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah menghitung banyaknya pengaduan pelanggaran yang masuk	Pengaduan pelanggaran yang masuk	Jumlah	Pengaduan
3	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			0	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	Gangguan ketertiban umum dan ketentraman	Jumlah	kejadian
4	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum			0	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang	Kabupaten	Jumlah	Pelanggaran dan



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	dalam Kab/Kota yang ditangani				ditangani adalah banyaknya pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani				pengaduan
5	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			0	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan adalah banyaknya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan yang terlatih dan dikukuhkan	satlinmas	Jumlah		Buah
6	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			0	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dan peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota yang memuat sanksi yang ditegakkan.	1. Perda 2. Perkada	Jumlah		Buah
7	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			0	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS adalah banyaknya anggota Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan	1. Jenis Kelamin 2. PNS	Jumlah		Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat			
8	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			0	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum adalah Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Ada/Tidak	Jumlah	Ada/Tidak
9	Tersedianya sarana prasarana minimal			0	Tersedianya sarana prasarana minimal adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas operasional	Ada/Tidak	Jumlah	Ada/Tidak
II	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ #DIV/0!		Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1. Perda 2. Perkada	Persentase	Persen
1	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan			0	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dan peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota yang memuat sanksi yang ditegakkan.	1. Perda 2. Perkada	Jumlah	Buah
2	Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi			0	Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala	1. Perda 2. Perkada	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					daerah dan peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota yang memuat sanksi				
III	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	#REF!	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	1. WNI 2. Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Jumlah	Orang	
2	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal adalah mengukur persentase penyelesaian dokumen 5 tahunan turunan yang lengkap dan sudah disahkan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. RIPB 2020-2044 adalah rencana jangka panjang 25 tahunan yang memuat visi-misi, kebijakan & strategi, juga peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Persentase	Persen	
3	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun			0	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun adalah penjelasan tujuan proyek, rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, hasil yang dicapai beserta dampaknya, status	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					terakhir sistem yang dibangun, serta daftar lampiran yang berhubungan dengan dokumentasi system				
4	Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			0	Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan adalah banyaknya dokumen 5 tahunan turunan yang lengkap dan sudah disahkan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. RIPB 2020-2044 adalah rencana jangka panjang 25 tahunan yang memuat visi-misi, kebijakan & strategi, juga peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	
5	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$ #DIV/0!		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana adalah mengukur persentase jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana	1. WNI 2. Penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	Persen	
6	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan			0	Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di	1. WNI 2. Jenis Ancaman Bencana	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	bencana sesuai jenis ancaman bencana				kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana				
7	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			0	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana adalah seluruh warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana sesuai kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana	1. WNI 2. Jenis Ancaman Bencana	Jumlah	Buah	
IV	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	#DIV/0!	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.WNI 2. Jenis Ancaman Bencana	Jumlah	Orang	
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			0	Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, memperoleh layanan pusdalops dan memperoleh peralatan perlindungan sesuai dengan jenis ancaman bencana	1. WNI 2. Jenis Ancaman Bencana	Jumlah	Buah	
			$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$						
2	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			#DIV/0!	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal adalah mengukur persentase penyelesaian dokumen 5 tahunan turunan sampai dinyatakan sah/legal dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044.	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					RIPB 2020-2044 adalah rencana jangka panjang 25 tahunan yang memuat visi-misi, kebijakan & strategi, juga peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana				
3	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun			0	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun adalah penjelasan tujuan proyek, rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, hasil yang dicapai beserta dampaknya, status terakhir sistem yang dibangun, serta daftar lampiran yang berhubungan dengan dokumentasi sistem	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	
4	Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan			0	Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan adalah banyaknya dokumen 5 tahunan turunan yang lengkap dan sudah disahkan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. RIPB 2020-2044 adalah rencana jangka panjang 25 tahunan yang memuat visi-misi, kebijakan & strategi, juga peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	
5	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{\text{#DIV/0!}}{\text{#DIV/0!}}$	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal adalah mengukur penyelesaian dokumen pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana				
6	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun			0	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun adalah penjelasan tujuan proyek, rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, hasil yang dicapai beserta dampaknya, status terakhir sistem yang dibangun, serta daftar lampiran yang berhubungan dengan dokumentasi sistem	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	
7	Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan			0	Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan adalah banyaknya satu dokumen pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat	1. Dokumen Lengkap & Sah 2. Belum lengkap	Jumlah	Buah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana ang lengkap dan sudah disahkan				
8	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		$\frac{\text{Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan adalah mengukur persentase banyaknya aparatur dan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikuti pelatihan	1. WNI 2. Penduduk yang ikut pelatihan	Persentase	Persen	
9	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			0	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan adalah menghitung banyaknya aparatur dan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikuti pelatihan	1. WNI 2. Penduduk yang ikut pelatihan	Jumlah	Buah	
10	Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana			0	Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana adalah banyaknya aparatur dengan warga negara yang menempati dan atau berkegiatan di daerah yang memiliki potensi bencana	1. WNI 2. Aparatur rawan bencana	Jumlah	Buah	
11	Persentase warga negara yang ikut pelatihan		$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase warga negara yang ikut pelatihan adalah mengukur persentase warga suatu negara yang	1.WNI 2. Penduduk yang ikut	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikuti pelatihan	pelatihan		
12	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan			0	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan adalah banyaknya warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikuti pelatihan	1. Kabupaten 2. Jenis Kelamin	Jumlah	Buah
13	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			0	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana adalah banyaknya warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di kawasan rawan bencana.	1. WNI 2. Penduduk di kawasan rawan bencana	Jumlah	Buah
14	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana adalah mengukur persentase warga negara yang mendapat layanan dari unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana	1. WNI 2. Penduduk yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase	Persen
15	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops			0	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops adalah banyaknya warga negara yang mendapat layanan dari unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi	WNI yang mendapatkan layanan pusdalops	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					penanggulangan bencana			
16	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			0	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana adalah banyaknya warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di kawasan rawan bencana.	1. WNI 2. Penduduk di kawasan rawan bencana	Jumlah	Buah
17	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan adalah mengukur persentase warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendapat peralatan perlindungan	WNI yang mendapatkan peralatan perlindungan	Persentase	Persen
18	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan			0	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan adalah banyaknya warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendapat layanan peralatan perlindungan	WNI yang mendapatkan peralatan perlindungan	Jumlah	Buah
19	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			0	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana adalah banyaknya warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di kawasan rawan bencana.	WNI yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah	Buah
V	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	1. WNI 2. Penduduk yang memperoleh	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	bencana				penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana.	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB adalah perbandingan antara Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB terhadap jumlah keseluruhan penetapan status KLB	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah	Buah
3	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB			0	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB adalah banyaknya kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status peningkatan kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjerus pada terjadinya wabah	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah	Buah
4	Jumlah seluruh penetapan status KLB			0	Jumlah seluruh penetapan status KLB adalah banyaknya keseluruhan penetapan status peningkatan kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan	1. Kejadian 2. Lingkup Daerah	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					yang dapat menjurus pada terjadinya wabah			
5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana adalah mengukur Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah	Buah
6	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana			0	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana adalah jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah	Buah
7	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			0	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana adalah banyaknya seluruh penetapan suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah	1. Siaga Darurat 2. Tanggap Darurat 3. Transisi	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan	darurat ke pemulihan		
8	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana adalah mengukur persentase banyaknya petugas yang aktif dalam penanganan keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan	Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah	Buah
9	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			0	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana adalah banyaknya petugas yang aktif dalam mengupayakan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana	Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah	Buah
10	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana			0	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana adalah banyaknya petugas dalam mengupayakan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana	Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
11	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana adalah mengukur persentase banyaknya korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jenis Bencana	Jumlah	Buah
12	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi			0	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi adalah menghitung banyaknya korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi	Jenis Bencana	Jumlah	Buah
13	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana			0	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah menghitung perkiraan banyaknya korban keseluruhan dari bencana	Jenis Bencana	Jumlah	Buah
VI	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			#VALUE!	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kabupaten	Persentase	Persen
1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah			0	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah adalah menghitung banyaknya layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah			
2	jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah		$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	0	Jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah adalah menghitung banyaknya layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	1.Kecamatan 2.Kelurahan	Jumlah	Buah
3	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota			0	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota adalah menghitung banyaknya kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Jumlah	Buah
4	Tingkat waktu tanggap (response time)			0	Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	1. Cepat 2. Tidak Cepat	Jumlah	Buah
5	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)			0	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1. Kecamatan 2. Layanan Penyelamatan & Evakuasi	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota				adalah menghitung banyaknya jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota				
6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.			0	Menghitung tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.	1. Ada 2. Tidak	Jumlah	1. Ada 2. Tidak	
7	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan.			0	Menghitung tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan.	1. Ada 2. Tidak	Jumlah	1. Ada 2. Tidak	
8	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa.			0	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa.	Kecamatan	Jumlah	Buah	
9	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.			0	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi adalah menghitung banyaknya dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan	Kecamatan	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					evakuasi			
10	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.			0	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran adalah menghitung banyaknya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Kecamatan	Jumlah	Buah
11	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.			0	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran adalah menghitung banyaknya relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kecamatan	Jumlah	Buah
12	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.			0	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran adalah menghitung banyaknya peningkatan kapasitas aparatur pemadam	Kecamatan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kebakaran			
VII	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	0	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kecamatan	Persentase	Persen
1	rata-rata waktu tanggap			0	Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran	Kecamatan	Rata-Rata	Menit

5.19 Bidang Perhubungan

Dalam Bidang Perhubungan memiliki indikator kinerja dalam Rasio konektivitas Kabupaten/Kota, dan Ratio di Jalan Kabupaten/Kota. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ $IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}}$	#VALUE!	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Berdasarkan rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	Rasio



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
			IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)						
1	Bobot angkutan jalan			0	Bobot angkutan adalah bobot perpindahan orang dan/atau barangdari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan	1 Jalan Nasional 2 Jalan Provinsi 3 Jalan Kabupaten 4 Jalan Kota 5 Jalan Desa	Jumlah	Bobot	
2	Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan			0	Bobot angkutan sungai dan danau adalah bobot kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau Bobot angkutan penyeberangan adalah bobot angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api	1. angkutan sungai 2. angkutan danau 3. angkutan penyeberangan	Jumlah	Bobot	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya				
3	Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota			0	Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP pada kabupaten/kota	Trayek yang dilayani	Jumlah	Unit	
4	Bobot trayek			0	Bobot trayek adalah bobot dari lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal	1. Bobot trayek dengan frekuensi tinggi 2. Bobot trayek dengan frekuensi sedang 3. Bobot trayek dengan frekuensi rendah	Jumlah	Bobot	
5	Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota			0	Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu pada kabupaten/kota	Berdasarkan kebutuhan trayek pada kabupaten/kota	Jumlah	Unit	
6	Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota			0	Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil pada kabupaten/kota	1. Kereta api 2. Bus	Jumlah	Unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Bobot lintas			0	Mengukur bobot lintas	Berdasarkan bobot lintas	Jumlah	Unit
8	Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota			0	Jumlah kebutuhan lintas pada kabupaten/kota adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu pada kabupaten/kota	1. Traffic Light 2. Flashing 3. Rambu	Jumlah	Unit
9	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta permindahan moda angkutan.	Berdasarkan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Persentase	Persen
10	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia			0	Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta permindahan moda angkutan.	Berdasarkan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Jumlah	Unit
11	rasio konektivitas Kabupaten/Kota			0	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Berdasarkan rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah	Unit
12	Terlaksananya pelayanan uji			#DIV/0!	Terlaksananya pelayanan uji berkala adalah terlaksananya	1. terlaksana 2. tidak terlaksana	Persentase	Persen

$$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$$

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	berkala				pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan				
13	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun			0	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun adalah banyaknya kendaraan yang melakukan kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Dinas/Unit Kerja yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan	1. Kendaraan daftar 2. Kendaraan lulus	Jumlah	Unit	
14	Jumlah kendaraan wajib uji			0	Jumlah kendaraan wajib uji adalah banyaknya kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan	1. Angkutan umum 2. Kendaraan Pribadi	Jumlah	Unit	
15	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten,		$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan}}{\text{Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi adalah penetapan nilai yang harus	1.Tarif ekonomi 2.Tarif non ekonomi.	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi				dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada angkutan antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi				
16	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan			0	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan adalah penetapan nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada lintas penyebrangan	1. Tarif penumpang; 2. Tarif kendaraan penumpang; 3. Tarif kendaraan barang beserta muatannya	Jumlah	Unit	
17	Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota			0	Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota adalah banyaknya alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau dalam kabupaten atau kota yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.	Berdasarkan lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota	Jumlah	Stasiun	
18	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota adalah mengukur persentase pelaksanaan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan	1. Sistem jaringan jalan primer. 2. Sistem jaringan jalan sekunder	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas				
19	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			0	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota adalah banyaknya pemasangan fasilitas pada suatu jalan di Kabupaten/Kota yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.	1. Barikade 2. Traffic cone 3. Cermin tikungan 4. Guardrail 5. Road barrier	Jumlah	Unit	
20	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			0	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota adalah target kebutuhan fasilitas pada suatu jalan di Kabupaten/Kota yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.	1. Barikade 2. Traffic cone 3. Cermin tikungan 4. Guardrail 5. Road barrier	Jumlah	Unit	
II	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0	V/C Ratio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. V/C Ratio digunakan untuk mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota.	Berdasarkan ratio jalan kabupaten/kota	Rasio	Rasio	
1	Persentase		$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase pelaksanaan	1. Sistem jaringan	Persenta	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota adalah mengukur persentase pelaksanaan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas	jalan primer. 2. Sistem jaringan jalan sekunder	se	
2	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			0	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota adalah banyaknya pemasangan fasilitas pada suatu jalan di Kabupaten/Kota yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.	1. Barikade 2. Trafic cone 3. Cermin tikungan 4. Guarddrail 5. Road barrier	Jumlah	Buah
3	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			0	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota adalah target kebutuhan fasilitas pada suatu jalan di Kabupaten/Kota yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan,	1. Barikade 2. Trafic cone 3. Cermin tikungan 4. Guarddrail 5. Road barrier	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.				

5.20 Bidang Perindustrian

Dalam Bidang Perindustrian memiliki indikator kinerja dalam Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota, Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota, dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Pertambahan jumlah			#DIV/0!	Mengukur tingkat	1. Industri	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - 1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - 1} \times 100\%$		pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Kecil 2. Industri Menengah		
1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n			0	Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000 atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp 15.000.000.000 Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada tahun n adalah banyaknya Industri Kecil dan Menengah pada n sesuai dengan kualifikasi diatas	1. Industri Kecil 2. Industri Menengah	Jumlah	Buah
2	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1			0	Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000	1. Industri kecil 2. Industri menengah	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling sedikit Rp 1.000.000.000 atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp 15.000.000.000 Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada tahun n-1 adalah banyaknya Industri Kecil dan Menengah pada tahun sebelumnya sesuai dengan kualifikasi diatas				
3	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur banyaknya izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan di Kawasan Industri dan penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam UIKI	1. Memiliki Izin Lokasi 2. Memiliki Izin Lingkungan 3. Berada dalam kawasan peruntukan Industri	Persentase	Persen	
4	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan			0	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan adalah banyaknya izin yang diberikan untuk	Izin yang diterbitkan	Jumlah	izin	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					melakukan pengembangan dan pengelolaan di Kawasan Industri dan penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam UIKI yang telah diterbitkan				
5	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			0	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk adalah banyaknya permohonan atau pengajuan izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan di Kawasan Industri dan penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam UIKI	permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Jumlah	permohonan	
II	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		$\frac{\text{capaian indikator} \times \left(\frac{100\%}{\text{jumlah indikator}}\right)}{\text{target indikator}}$	#DIV/0!	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi ditetapkan dalam RPIK	Ukuran	Satuan
1	capaian indikator			0	Capaian indikator merupakan hasil perbuatan mencapai sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan	capaian indikator	Jumlah	Indikator
2	target indikator			0	Target indikator adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai	target indikator	Jumlah	Indikator
3	Jumlah indikator			0	Jumlah indikator merupakan banyaknya penanda yang dapat diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan	Jumlah indikator	Jumlah	Indikator
4	Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)			0	Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun	1. Industri Andalan 2. Industri Pendukung 3. Industri Hulu	Jumlah	Buah
5	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)			0	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,	1. Industri Andalan 2. Industri Pendukung	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun	3. Industri Hulu		
6	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		Capaian target tahapan penyelesaian RPIK	0	Mengukur banyaknya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun yang selsai ditetapkan menjadi PERDA	1. Industri Andalan 2. Industri Pendukung 3. Industri Hulu	Jumlah	Buah
III	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	#VALUE !	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis			0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil	1. Identitas perusahaan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	dalam laporan hasil pemantauan				pemantauan adalah banyaknya izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan industri yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri		
2	Jumlah izin yang dikeluarkan			0	Jumlah izin yang dikeluarkan adalah banyaknya izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan industri yang dikeluarkan	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri	Jumlah	Buah
3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	#VALUE! !	Mengukur Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	1. Industri kecil 2. Industri menengah	Persentase	Persen
4	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan			0	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan industri yang telah diterbitkan	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						5. Luas lahan lokasi industri		
5	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			0	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk adalah banyaknya permohonan atau pengajuan izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan industri	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri	Jumlah	Buah
IV	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	#VALUE !	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1. Industri kecil 2. Industri menengah	Persentase	Persen
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan			0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah banyaknya izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan industri yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
						industri 6. Memiliki IUI		
2	Jumlah izin yang dikeluarkan		$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	0	Indikator pembangunan industri: 1. Pertumbuhan sektor industri nonmigas 2. Kontribusi industri non migas terhadap PDB 3. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor 4. Jumlah tenaga kerja di sektor 5. Persentase tenaga kerja di sektor indust	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri 6. Memiliki IUI	Jumlah	Buah
3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan			#VALUE! !	Mengukur jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	1. Industri kecil 2. Industri menengah	Persentase	Persen
4	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan			0	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan adalah banyaknya izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan industri yang diterbitkan	1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri 6. Memiliki	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			0	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk adalah banyaknya permohonan atau pengajuan izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan industri	IUI 1. Identitas perusahaan 2. NPWP 3. Jumlah tenaga kerja 4. Nilai investasi 5. Luas lahan lokasi industri 6. Memiliki IUI	Jumlah	Buah
V	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	#VALUE !	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1. Industri kecil 2. Industri menengah	Persentase	Persen
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan			0	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah banyaknya izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan di Kawasan Industri dan penambahan luas	1. Memiliki Izin Lokas 2. Memiliki Izin Lingkungan 3. Telah dilakukan pemeriksaan	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam UIKI yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	lapangan		
2	Jumlah izin yang dikeluarkan			0	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan adalah banyaknya izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan di Kawasan Indutri dan penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam UIKI yang telah dikeluarkan	1. Memiliki Izin Lokas 2. Memiliki Izin Lingkungan 3. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan	Jumlah	Buah
VI	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		kelengkapan informasi industri + keterkinian informasi industri Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Kelengkapan informasi industri meliputi : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	0	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
1	kelengkapan informasi industri			0	Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan	institusi, sumber daya	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.	manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data		
2	keterkinian informasi industri		$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\%$	0	Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.	institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data	Jumlah	Buah
3	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota			#VALUE! !	Mengukur data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1. industri kecil 2. industri menengah 3. perusahaan kawasan industri	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas			0	Banyaknya perusahaan industri kecil, industri menengah, dan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri	1. industri kecil 2. industri menengah 3. perusahaan kawasan industri	Jumlah	Buah
5	Total populasi perusahaan industri kecil, menengah, dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota			0	Banyaknya perusahaan industri kecil, industri menengah, dan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri	1. industri kecil 2. industri menengah 3. perusahaan kawasan industri	Jumlah	Buah

5.21 Bidang Perpustakaan

Dalam Bidang Perpustakaan memiliki indikator kinerja dalam hal Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks pembangunan literasi masyarakat. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Nilai tingkat kegemaran membaca		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan	0	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1. pengunjung perpustakaan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	masyarakat		survei/kajian kegemaran membaca masyarakat					
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	#DIV/0!	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk adalah perbandingan antara koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayah (dalam eksemplar) terhadap penduduk di wilayah (dalam jiwa)	1. Karya tulis 2. Karya cetak 3. Karya rekam	Rasio	Rasio
2	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)			0	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.	1. Karya tulis 2. Karya cetak 3. Karya rekam	Jumlah	Unit
3	Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			0	Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.	1. WNI/WNA 2. Jenis kelamin 3. Usia 4. Pekerjaan	Jumlah	Orang
4	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat yaitu persentase pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan	1. Pengunjung perpustakaan umum 2. Pengunjung perpustakaan sekolah	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					sebagai proses pembelajaran oleh masyarakat	3. Pengunjung perpustakaan perguruan tinggi		
5	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite			0	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite adalah banyaknya pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan baik secara online maupun onsite	1. Perpustakaan nasional 2. Perpustakaan umum 3. Perpustakaan sekolah 4. Perpustakaan perguruan tinggi 5. Perpustakaan khusus	Jumlah	orang
6	Jumlah penduduk di wilayahnya			0	Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.	1. WNI/WNA 2. Jenis kelamin 3. Usia 4. Pekerjaan	Jumlah	Buah
7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	0	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk adalah rasio tenaga perpustakaan yang memenuhi kriteria Standar Tenaga Perpustakaan yaitu minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.	1. Pustakawan 2. Tenaga teknis perpustakaan	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
8	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya			0	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya adalah ketersediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi kriteria Standar Tenaga Perpustakaan yaitu minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.	1. Akademis 2. Kompetensi 3. Sertifikasi	Jumlah	orang
9	Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			0	Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.	1. WNI/WNA 2. Jenis kelamin 3. Usia 4. Pekerjaan	Jumlah	Jiwa
10	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan adalah persentase perpustakaan sesuai kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Perpustakaan nasional 2. Perpustakaan umum 3. Perpustakaan sekolah 4. Perpustakaan perguruan tinggi 5. Perpustakaan khusus	Persentase	Persen
11	Jumlah			0	Jumlah perpustakaan sesuai	1. Perpustakaan nasional	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				standar nasional perpustakaan adalah banyaknya perpustakaan sesuai kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2. Perpustakaan umum 3. Perpustakaan sekolah 4. Perpustakaan perguruan tinggi 5. Perpustakaan khusus		
12	Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya			0	Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya adalah banyaknya perpustakaan dari berbagai jenis meliputi Perpustakaan Nasional; Perpustakaan Umum; Perpustakaan Sekolah/Madrasah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan Perpustakaan Khusus	1. Perpustakaan umum 2. Perpustakaan sekkolah 3. Perpustakaan perguruan tinggi	Jumlah	Unit
13	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			0	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat adalah peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter	Gemar membaca	Jumlah	Buah
II	Indeks Pembangunan		$\frac{\text{Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat}}{\text{Jumlah aspek masyarakat}} \times 100\%$	#REF!	Mengukur indeks pembangunan literasi	1. frekuensi membaca per minggu (kali)	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Literasi Masyarakat				masyarakat	2. durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam) 3. banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul)		
1	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat			0	(1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; (4) ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan. baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (5) kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan.	1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan 5. Perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan 7. Anggota perpustakaan	Jumlah	unsur
3	Jumlah naskah kuno yang			0	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media	1. Diakuisisi 2. Dialih media	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya adalah jumlah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	3. Terdaftar			
4	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			0	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa adalah banyaknya semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan yang dialih aksara dan dialih bahasa	1. Dialih aksara 2. Dialih bahasa	Jumlah	Buah	
5	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau			0	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun	1. Tersimpan 2. Terdaftar	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan				

5.22 Bidang Persandian

Dalam Bidang Persandian memiliki indikator kinerja dalam hal Tingkat keamanan informasi pemerintah. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Tingkat keamanan informasi pemerintah		$\frac{\text{jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks	Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					KAMI. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.	Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi		
1	Jumlah nilai per area keamanan informasi			0	Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah total nilai disetiap area keamanan informasi. Area keamanan informasi terdiri Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi	area keamanan informasi	Jumlah	Nilai
2	Jumlah area penilaian			0	Jumlah area penilaian yaitu banyaknya area yang menjadi prioritas organisasi terhadap	a. data dan informasi SPBE;	Jumlah	Nilai

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi: a. data dan informasi SPBE; b. Aplikasi SPBE; c. aset Infrastruktur SPBE; dan d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki	b. Aplikasi SPBE; c. aset Infrastruktur SPBE; dan d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki		
3	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.		$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.	Kegiatan strategis teramankan	Persentase	Persen
4	Jumlah kegiatan strategis teramankan			0	Jumlah kegiatan strategis teramankan adalah banyaknya kegiatan strategis yang diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis.	Kegiatan strategis teramankan	Jumlah	Buah
5	Jumlah kegiatan strategis yang ada			0	Jumlah kegiatan strategis yang ada adalah banyaknya kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada	Berdasarkan kegiatan strategis yang ada	Jumlah	Buah



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain.				
6	Persentase sistem elektronik (SE) yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.		$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll; yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada	Struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian			0	pemerintah daerah. Banyaknya Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll; yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	1. Lingkup publik 2. Lingkup privat	Jumlah	Buah
8	Jumlah SE yang ada			0	Banyaknya Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau	1. Lingkup publik 2. Lingkup privat	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll				
9	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1. Lingkup publik 2. Lingkup privat	Persentase	Persen	
10	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			0	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah adalah banyaknya Sistem Elektronik rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara; dan berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu	1. Lingkup publik 2. Lingkup privat	Jumlah	Buah	
11	Jumlah SE yang ada			0	Banyaknya Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,	1. Lingkup publik 2. Lingkup privat	Jumlah	Buah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll				
12	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan adalah persentase banyaknya komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau mengirim data/informasi dengan ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi	Titik yang teramankan	Persentase	Persen	
13	Jumlah titik teramankan			0	Jumlah titik teramankan adalah banyaknya komponen JKS yang	Titik yang teramankan	Jumlah	Titik	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dapat menerima, membuat, menyimpan, atau mengirim data/informasi. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi				
14	Jumlah titik pada PHKS			0	Jumlah titik pada PHKS adalah banyaknya komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau mengirim data/informasi pada PHKS	Titik yang teramankan	Jumlah	Titik	

5.23 Bidang Pertanahan

Dalam Bidang Pertanahan memiliki indikator kinerja dalam Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, Tersedianya tanah obyek landreform (tol) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, Tersedianya tanah untuk masyarakat, Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data
-----	--------	------	-------	-------	---------------

				Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	#DIV/0! Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1. Subjek lokasi 2. Objek lokasi	Persentase	Persen
1	Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi			0	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi.	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Jumlah Ha
2	Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi			0	Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah seluruh luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Jumlah Ha
3	Izin lokasi			0	Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Jumlah Bua
4	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun}} \times 100\%$	#DIV/0! SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali Kota adalah surat keputusan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya yang diterbitkan oleh bupati/walikota				
5	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan			0	Yang dimaksud dengan jumlah izin lokasi yang diterbitkan adalah banyaknya izin yang diterbitkan untuk pelaku usaha guna memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatan.	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Jumlah	Buah	
6	Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)			0	Yang dimaksud dengan jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya setelah melalui	1. Subjek izin lokasi 2. Objek izin lokasi	Jumlah	Buah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun			0	<p>proses (ditolak seluruhnya)</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun adalah banyak permintaan izin dalam satu tahun yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya</p>	<p>1. Subjek izin lokasi</p> <p>2. Objek izin lokasi</p>	Jumlah	Buah
8	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek		$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	#DIV/0!	<p>SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek adalah SK Bupati/Walikota tentang Penetapan tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap yang bersumber dari tanah yang melebihi batasketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga/ tanah pertanian yang pemilikinya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan</p>	Berdasarkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform	Persentase	Persen



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					letak tanah tidak berbatasan			
9	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee			0	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek adalah penerbitan SK Penetapan tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap yang bersumber dari tanah yang melebihi batasketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga/ tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan	Berdasarkan penerbitan SK tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform	Jumlah	Buah
10	Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform			0	Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform adalah menghitung banyaknya permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	Berdasarkan permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	Jumlah	Buah
11	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik		$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	#DIV/0!	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan Maksimum/Absentee	Berdasarkan SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee				adalah SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap yang bersumber dari tanah yang melebihi batasketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga/ tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan	Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		
12	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee			0	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee adalah banyaknya luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang melebihi batasketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga/ tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan	Berdasarkan luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Jumlah	Ha
13	Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform			0	Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari	Berdasarkan luas tanah yang telah ditetapkan sebagai	Jumlah	Ha

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek				tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek adalah banyaknya tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap yang berasal dari tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga/ tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan	tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		
14	Dokumen Izin membuka tanah		$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui} + \text{Jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	#DIV/0!	Dokumen Izin membuka tanah merupakan dokumen izin yang diberikan oleh Daerah kepada perorangan dalam rangka menggunakan dan mengambil manfaat atas tanah untuk keperluan pertanian, dimana tanah bersangkutan belum dilekati dengan hak apapun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.	Berdasarkan izin yang diberikan	Persentase	Persen
15	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui			0	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui adalah menghitung banyaknya dokumen atau berkas izin yang diberikan dan telah disetujui oleh Daerah kepada perorangan dalam rangka	Berdasarkan izin yang diberikan	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					menggunakan dan mengambil manfaat atas tanah untuk keperluan pertanian, dimana tanah bersangkutan belum dilekati dengan hak apapun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan				
16	Jumlah izin membuka tanah yang ditolak			0	Jumlah izin membuka tanah yang ditolak adalah menghitung banyaknya izin yang tidak diterima oleh Daerah dari perorangan dalam rangka menggunakan dan mengambil manfaat atas tanah untuk keperluan pertanian, dimana tanah bersangkutan belum dilekati dengan hak apapun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.	Berdasarkan dokumen permohonan izin membuka tanah	Jumlah	Buah	
17	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun			0	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun adalah menghitung banyaknya permohonan dokumen atau berkas izin dalam 1 tahun yang diberikan dan telah disetujui oleh Daerah kepada perorangan dalam rangka menggunakan dan mengambil manfaat atas tanah untuk keperluan pertanian, dimana tanah bersangkutan belum dilekati dengan hak	Berdasarkan dokumen permohonan izin membuka tanah	Jumlah	Buah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					apapun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan				
18	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam satu tahun}} \times 100\%$	#DIV/0!	Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota meliputi penggunaan atas ruang di atas dan dibawah tanah sesuai dengan batas-batas peruntukannya.	1. penggunaan ruang atas 2. pengngnaan ruang bawah 3. batas peruntukan	Persentase	Persen	
19	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik			0	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik adalah menghitung banyaknya dokumen atau berkas penetapan site lokasi pembangunan fisik	Berdasarkan penetapan site lokasi	Jumlah	Buah	
20	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam satu tahun			0	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam satu tahun adalah menghitung banyaknya perencanaan dokumen atau berkas penetapan site lokasi pembangunan fisik dalam satu tahun	Berdasarkan penetapan site lokasi	Jumlah	Buah	
II	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Berdasarkan pembangunan fasilitas umum	Persentase	Persen	
1	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			0	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah menghitung banyaknya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan umum	Berdasarkan pembangunan fasilitas umum	Jumlah	Ha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
					kemasyarakatan			
2	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			0	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah menghitung banyaknya kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan umum kemasyarakatan	Berdasarkan pembangunan fasilitas umum	Jumlah	Ha
III	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Berdasarkan lokasi pembangunan	Persentase	Persen
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi			0	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi adalah mengukur pemanfaatan luas tanah sesuai dengan peruntukannya di atas izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya	1. luas tanah 2. izin lokasi	Jumlah	Ha
2	Luas izin lokasi yang diterbitkan			0	Yang dimaksud dengan luas izin lokasi yang diterbitkan adalah luas izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh	1. luas tanah 2. izin lokasi	Jumlah	Buah

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya				
IV	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1, Tersedia dan terredistribusi 2. Tidak tersedia dan tidak terredistribusi	Persentase	Persen	
1	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha			0	Yang dimaksud dengan jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha adalah banyaknya penerima tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	1. penerima tanah obyek landreform 2. luas tanah	Jumlah	Orang	
2	Jumlah penerima tanah obyek landreform			0	Yang dimaksud dengan jumlah penerima tanah obyek landreform adalah banyaknya penerima tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap	Berdasarkan penerima tanah obyek landreform	Jumlah	Orang	
3	tanah kelebihan			0	Yang dimaksud dengan tanah	Berdasarkan tanah	Jumlah	Ha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	maksimum				kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batasketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga	kelebihan maksimum		
4	tanah absentee			0	Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan	1. luar kecamatan letak tanah 2. kecamatan letak tanah tidak berbatasan	Jumlah	Ha
V	Tersedianya tanah untuk masyarakat		$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang telah diterbitkan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	1. tanah objek landreform 2. tanah kelebihan maksimum 3. tanah absentee	Persentase	Persen
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah			0	Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.	1. luas tanah 2. dokumen izin membuka tanah	Jumlah	Ha
2	Luas izin membuka tanah yang telah diterbitkan			0	Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.	1. luas tanah 2. dokumen izin membuka tanah yang telah diterbitkan	Jumlah	Buah
VI	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui		$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	1. sengketa tanah garapan 2. mediasi	Persentase	Persen

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	mediasi				melalui mediasi			
1	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani			0	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani adalah banyaknya perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.	Berdasarkan penanganan sengketa tanah garapan	Jumlah	Buah
2	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			0	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan adalah banyaknya pengaduan tentang perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.	Berdasarkan pengaduan sengketa tanah garapan	Jumlah	Buah

5.24 Bidang Pertanian

Dalam Bidang Pertanian memiliki indikator kinerja dalam hal Produktivitas pertanian per hektar per tahun, Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun		$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{\#DIV/0!}{0}$	Produktivitas pertanian adalah produksi yang dihasilkan pertanian dibagi dengan luas pertanian. Mengukur tingkat produktivitas pertanian.	Jenis produksi pertanian	Persentase	Persen
1	Jumlah produksi pertanian pangan			0	Jumlah produksi pertanian adalah banyaknya beras dan bahan pangan pokok lainnya	1. Jenis Produksi Pertanian 2. Kecamatan	Jumlah	Ton
2	Luas Panen			0	Luasan tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur	1. Kabupaten/Kota 2. Kecamatan	Luas	Hektar
3	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	0	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan adalah banyaknya sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri	1. Luas Areal Perairan 2. Kecamatan	Jumlah	Unit
4	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	0	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan adalah jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.	1. Luas Areal Perairan 2. Kecamatan	Jumlah	Ha
5	Jumlah penerbitan izin usaha pertanian		Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	0	Jumlah penerbitan izin usaha pertanian adalah izin yang	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen				
6	Persentase prasarana yang digunakan		$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	#REF!	Persentase prasarana yang digunakan adalah persentase penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.	1. Benih dan/atau bibit 2. Alat dan mesin 3. Pupuk organik dan anorganik	Persentase	Persen	
7	Jumlah prasarana yang aktif digunakan			0	Jumlah prasarana yang aktif digunakan adalah banyaknya prasarana pertanian yang aktif digunakan	Prasarana	Jumlah	Unit	
8	Jumlah prasarana yang dibangun			0	Jumlah prasarana yang digunakan adalah banyaknya prasarana yang digunakan	Prasarana	Jumlah	Unit	
9	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota		$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	#DIV/0!	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota adalah persentase izin yang diterbitkan oleh	Usulan izin usaha pertanian	Persentase	Persen	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen				
10	Jumlah usulan yang difasilitasi			0	Jumlah usulan yang difasilitasi adalah banyaknya usulan usaha yang difasilitasi	Usulan yang difasilitasi	Jumlah	Usulan	
11	Jumlah usulan usaha pertanian			0	Jumlah usulan usaha pertanian adalah banyaknya usulan usaha pertanian	Usulan usaha pertanian	Jumlah	Usulan	
II	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	0	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	1. Penyakit hewan bersifat infeksius 2. Penyakit hewan bersifat non infeksius	Persentase	Persen	
1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana			#DIV/0!	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana adalah perbandingan antara jumlah prasarana yang aktif digunakan terhadap jumlah prasaranan yang dibangun.	Fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase	Persen	
2	Jumlah area yang dapat ditanggulangi			0	Jumlah area yang dapat ditanggulangi adalah lokasi kegiatan dipilih pada desa-desa dan kecamatan yang mengalami dampak paling besar dari bencana yang telah terjadi (meliputi banjir, kekeringan,	1. Desa 2. Kecamatan	Jumlah	Ha	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					tanah longsor, badai, gempa bumi, gunung meletus, eksplorasi hama dan penyakit, kelaparan maupun daerah konflik)				
3	Luas area terkena bencana			0	Luas area terkena bencana adalah luasan area yang terkena bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	1. Penyakit hewan bersifat infeksius 2. Penyakit hewan bersifat non infeksius	Jumlah	Ha	

5.25 Bidang Pendidikan

Dalam Bidang Pendidikan memiliki indikator kinerja dalam Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Adapun elemen yang termasuk dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
I	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penduduk usia 5-6 tahun	Persentase	Persen
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun			0	Jumlah anak usia 5-6 tahun adalah banyaknya warga penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya.	1. Penduduk usia 5-6 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Kabupaten/Kota	Jumlah	Orang
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD			0	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya.	1. Penduduk usia 5-6 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Tamat belajar 4. Sedang belajar	Jumlah	Orang
3	Pendidikan Anak Usia Dini			0	Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang	1. PAUD 2. Taman kanak-kanak	Jumlah	Unit

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.				
5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)			0	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah banyaknya pendidikan anak usia dini dengan suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.	1. Terakreditasi A 2. Terakreditasi B 3. Terakreditasi C	Jumlah	Unit	
6	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang			0	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.				peserta didik dari pemerintah daerah adalah banyaknya peserta didik yang menerima perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi: buku gambar dan alat mewarnai.				
7	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			0	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan adalah jumlah peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan maksud untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	
8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan			0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) adalah standar jumlah dan kualitas pendidik dan	1. Negeri 2. Swasta 3. Bersertifikat 4. Tidak Bersertifikat	Jumlah	Unit, Rupiah	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	Swasta).				tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.				
9	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)			0	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) adalah banyaknya pendidik yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas: a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.	1. Negeri 2. Swasta 3. Bersertifikat 4. Tidak Bersertifikat	Jumlah	Orang	
10	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan			0	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini				ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini adalah banyaknya pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat (bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional).	S-1 3. Psikologi 4. Sertifikat profesi guru PAUD		
11	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat			0	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Psikologi 4. Sertifikat profesi guru PAUD	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah.				pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah adalah banyaknya kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat (bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional), dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formula atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintahan.			
II	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar		$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Penduduk Usia 7-12 tahun	Persentase	Persen
1	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di			0	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar adalah anak	1. Penduduk usia 7-12 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Tamat belajar	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	sekolah dasar				usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar.	4. Sedang belajar		
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan			0	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan adalah banyaknya warga penduduk usia 7-12 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya	1. Penduduk usia 7-12 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Kabupaten/Kota	Jumlah	Orang
3	Pendidikan Dasar			0	Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.	1. SD 2. MI 3. Pendidikan sederajat lainnya	Jumlah	Unit



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
4	Jumlah SD Negeri terakreditasi.			0	Jumlah SD Negeri terakreditasi adalah banyaknya sekolah dengan suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B, atau C (Dibuat terpisah).	1.Terakreditasi A 2.Terakreditasi B 3.Terakreditasi C	Jumlah	Unit
5	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah adalah banyaknya peserta didik yang menerima perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar meliputi: buku teks pelajaran dan	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
6	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.			0	perlengkapan belajar. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah adalah banyaknya peserta didik yang menerima perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama meliputi: buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang
7	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan adalah banyaknya peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan maksud untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat				
8	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan adalah banyaknya peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan maksud untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	
9	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).			0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) adalah jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan dengan jenis pendidik sebagaimana dimaksud	1. Guru kelas 2. Guru mata pelajaran	Jumlah	Unit, Rupiah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. guru kelas; b. guru mata pelajaran.				
10	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).			0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) adalah jumlah minimal jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.	Guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum	Jumlah	Unit, Rupiah	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Unit, Rupiah	
12	Jumlah kebutuhan minimal tenaga			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Unit, Rupiah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).				jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.				
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; b. tenaga penunjang lainnya.	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Orang	
14	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.				
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.			0	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik adalah total keseluruhan pendidik Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik	Jumlah	Orang	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan			0	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah total	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik 4. Surat tanda tamat pendidikan 5. Pelatihan calon	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				keseluruhan kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik (bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional) dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	kepala sekolah		
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			0	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat adalah total keseluruhan tenaga penunjang lainnya sebagai tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.	Memiliki paling rendah ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	Orang
20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri			0	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Memiliki paling rendah ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat				adalah total keseluruhan tenaga penunjang lainnya sebagai tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.				
III	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	#DIV/0!	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	Penduduk Usia 13-15 tahun	Persentase	Persen	
1	Jumlah anak usia 13-15 tahun sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama			0	Jumlah anak usia 13-15 tahun sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama adalah total keseluruhan anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama.	1. Penduduk usia 13-15 tahun 2. Jenis Kelamin	Jumlah	Orang	
2	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan			0	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan adalah warga negara/penduduk/anak	1. Penduduk usia 13-15 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Kabupaten/Kota	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya.				
4	Pendidikan Menengah Pertama			0	Pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI.	1. SMP 2. MTs 3. Pendidikan sederajat lainnya	Jumlah	Unit	
5	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi.			0	Jumlah keseluruhan SMP Negeri terakreditasi adalah total keseluruhan SMP Negeri yang sudah terakreditasi baik A, B, atau C	1. Terakreditasi A 2. Terakreditasi B 3. Terakreditasi C	Jumlah	Unit	
6	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	1. Negeri 2. Swasta 3. Buku teks pelajaran 4. Perlengkapan belajar	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	didik dari pemerintah daerah.				adalah banyaknya peserta didik yang menerima perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar meliputi: buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar.				
7	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah adalah banyaknya peserta didik yang menerima perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama meliputi: buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	
8	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan adalah banyaknya peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					maksud untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat				
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan.			0	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan adalah banyaknya peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan maksud untuk memberikan pemerataan pendidikan, memberikan kesempatan terhadap semua warga masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan serta untuk mengurangi beban masyarakat	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang	
10	Jumlah kebutuhan minimal			0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1. Guru kelas 2. Guru mata pelajaran	Jumlah	Unit, Rupiah	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	pendidik pada jenjang sekolah dasar.				(Negeri dan Swasta) adalah jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan dengan jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. guru kelas; b. guru mata pelajaran.				
11	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.			0	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) adalah jumlah minimal jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.	Guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum	Jumlah	Unit, Rupiah	
12	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.			0	Jumlah kebutuhan pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) adalah jumlah keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	1. Guru kelas 2. Guru mata pelajaran	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					huruf a terdiri atas: a. guru kelas; b. guru mata pelajaran.				
13	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.			0	Jumlah kebutuhan pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) adalah jumlah keseluruhan jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.	Guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum	Jumlah	Pendidik	
14	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Unit, Rupiah	
15	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	sekolah menengah pertama.				(Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya seluruh tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.				
16	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.			0	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang lainnya.	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Orang	
17	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.			0	Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yaitu banyaknya seluruh tenaga pendidik dengan jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; dan b. tenaga penunjang	1. Kepala sekolah 2. Tenaga penunjang lainnya	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					lainnya.				
18	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.			0	Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik	Jumlah	Orang	
19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.			0	Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik	Jumlah	Orang	
20	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat			0	Kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah atau madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik 4. Surat tanda tamat pendidikan 5. Pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah	Orang	



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.							
21	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.			0	Kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah atau madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik 4. Surat tanda tamat pendidikan 5. Pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah	Orang
22	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			0	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat adalah banyaknya tenaga penunjang lainnya sebagai tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.	Memiliki paling rendah ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	Orang
23	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada			0	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah	Memiliki paling rendah ijazah SMA/ sederajat	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.				pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat adalah banyaknya tenaga penunjang lainnya sebagai tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.				
IV	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	#VALUE!	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	Penduduk usia 7-18 tahun	Persentase	Persen	
1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di			0	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan adalah total keseluruhan anak usia 7-18 tahun yang	1. Penduduk usia 7-18 tahun 2. Jenis Kelamin 3. Sedang belajar 4. Tamat belajar	Jumlah	Orang	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
	pendidikan kesetaraan				putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah.				
2	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya	1. Penduduk usia 7-18 tahun 2. Jenis Kelamin	Jumlah	Orang	
3	Pendidikan kesetaraan			0	Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik.	1. Paket A 2. Paket B 3. Paket C	Jumlah	Unit	
4	Jumlah satuan			0	Pendidikan kesetaraan	1. Negeri	Jumlah	Unit	

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).				adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik.	2. Swasta 3. Paket A 4. Paket B		
5	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah			0	Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah anak usia sekolah dan dewasa yang belum mampu menyelesaikan SD, SMP, dan SM. Dilihat dari sisi peserta didik kesetaraan mempunyai dimensi yang luas, yaitu warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan karena keterbatasan yang dimiliki baik di bidang ekonomi, sosial, budaya atau karena kondisi geografis maka mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan.	1. Negeri 2. Swasta	Jumlah	Orang
6	Jumlah			0	Jumlah kebutuhan	Tutor pendidikan	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
	kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)				minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) adalah jumlah minimal pendidik dengan jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.	kesetaraan		
7	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			0	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) adalah jumlah pendidik dengan jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.	Tutor pendidikan kesetaraan	Jumlah	Orang
8	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			0	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) adalah total keseluruhan pendidik satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1	Jumlah	Orang

No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data			
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.			0	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah total keseluruhan kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik (bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional) dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik 4. Surat tanda tamat pendidikan 5. Pelatihan calon kepala sekolah 	Jumlah	Orang
10	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.			0	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah untuk memimpin dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ijazah D-IV 2. Memiliki ijazah S-1 3. Sertifikat pendidik 4. Surat tanda tamat pendidikan 5. Pelatihan calon kepala sekolah 	Jumlah	Orang



No.	Elemen	Data	Rumus	Hasil	Standart Data				
					Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	
					mengelola sekolah atau madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.				

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan Kerangka Satu Data Kota Madiun pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 25 bidang dari Perangkat Daerah Kota Madiun sudah disusun standar datanya. Adapun setiap bidang terdiri dari beberapa indikator kinerja antara lain

- a. Bidang Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 4 indikator kinerja
- b. Bidang Pekerjaan Umum mempunyai 9 indikator kinerja
- c. Bidang Kearsipan mempunyai 2 indikator kinerja
- d. Bidang Kebudayaan mempunyai 1 indikator kinerja
- e. Bidang Kelautan mempunyai 1 indikator kinerja
- f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 3 indikator kinerja
- g. Bidang Kesehatan mempunyai 15 indikator kinerja
- h. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 indikator kinerja
- i. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 3 indikator kinerja
- j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 2 indikator kinerja
- k. Bidang Lingkungan Hidup mempunyai 2 indikator kinerja
- l. Bidang Pariwisata mempunyai 5 indikator kinerja

- m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai 2 indikator kinerja
- n. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai 5 indikator kinerja
- o. Bidang Sosial mempunyai 2 indikator kinerja
- p. Bidang Statistik mempunyai 2 indikator kinerja
- q. Bidang Tenaga Kerja mempunyai 5 indikator kinerja
- r. Bidang Trantibumlinmas mempunyai 7 indikator kinerja
- s. Bidang Perhubungan mempunyai 2 indikator kinerja
- t. Bidang Perindustrian mempunyai 6 indikator kinerja
- u. Bidang Perpustakaan mempunyai 2 indikator kinerja
- v. Bidang Persandian mempunyai 1 indikator kinerja
- w. Bidang Pertanahan mempunyai 6 indikator kinerja
- x. Bidang Pertanian mempunyai 2 indikator kinerja
- y. Bidang Pendidikan mempunyai 4 indikator kinerja

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan Kerangka Satu Data Kota Madiun pada tahun 2021 sebagai berikut

1. Perlu menggali elemen data yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2. Perlu adanya update dan penyesuaian Kerangka Satu Data Kota Madiun ditahun berikutnya.



KOTA MADIUN

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Kota Madiun